

**PERAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DAN RELASI MEDIA
MASSA LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NTB**

**(Studi Kasus Pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekertariat
Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa: Lombok Post dan *Lombokita.com*)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan**

Oleh :

KHOIRUL HIDAYAT

NIM.105120600111014



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

PERNYATAAN

Nama : Khoirul Hidayat
NIM : 105120600111014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Peran *Electronic Government* dan Relasi Media Massa Lokal Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa Lombok Post dan *Lombokita.com*)** adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Beberapa hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari penelitian skripsi tersebut.

Malang, 19 Mei 2014
Yang Membuat Pernyataan,

Khoirul Hidayat
NIM.105120600111014

**PERAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DAN RELASI MEDIA MASSA
LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI PROVINSI NTB**

(Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekretariat
Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa Lombok Post dan *Lombokita.com*)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Khoirul Hidayat
NIM.105120600111014

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama:

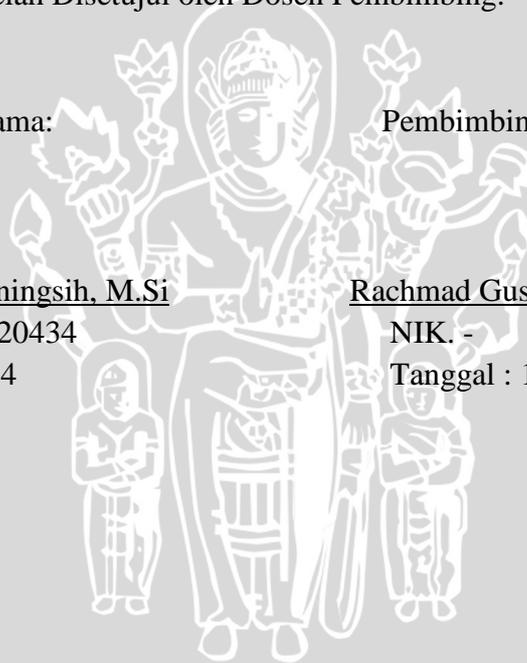
Pembimbing Pendamping:

Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si
NIK.67040911120434

Tanggal : 17 April 2014

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
NIK. -

Tanggal : 17 April 2014



**PERAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DAN RELASI MEDIA MASSA
LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI PROVINSI NTB**

(Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekretariat
Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa Lombok Post dan *Lombokita.com*)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Khoirul Hidayat

NIM.105120600111014

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 25 April 2014

Tim Penguji:

Pembimbing Utama:

Pembimbing Pendamping:

Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si

NIK.67040911120434

Tanggal : 13 Mei 2014

Ketua Sidang Majelis Penguji

M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si

NIK.79241011110413

Tanggal : 16 Mei 2014

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

NIK.

Tanggal: 9 Mei 2014

Sekretaris Majelis Penguji

Andi Setiawan, S.IP., M.Si

NIK.

Tanggal: 14 Mei 2014

Malang, 27 Mei 2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr .Ir. H. Darsono Wisadirana, MS.

NIP. 195612271983121001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah membantu berjalannya proses penelitian dan penulisan laporan skripsi yang berjudul **Peran *Electronic Government* dan Relasi Media Massa Lokal Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa Lombok Post dan Lombokita.com)** dapat terselesaikan, dengan baik.

Kegiatan penelitian skripsi ini mendasarkan kepada berjalannya unsur keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB, yang tentunya dibantu dengan beberapa program dari Pemerintah Provinsi NTB untuk menunjang publikasi informasi seperti *e-government* dan media massa lokal dalam menjembatani proses tersebut. Penelitian skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai upaya penyelesaian tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Ucapan terimakasih, tentunya saya ucapkan kepada orang tua tercinta terutama Bapak Haji Usman dan Mamak Hajjah Sri Hidayati yang selalu memberi dukungan baik berupa doa, nasihat, dan semangat dari luar pulau namun terasa sangat dekat yang tiada hentinya dalam proses penulisan laporan skripsi ini. Tidak lupa Mbak Yuni Astuti, saudara perempuan saya satu-satunya yang selalu mengingatkan, memberi *wejangan*, dalam mengerjakan laporan penelitian skripsi ini. Serta Abah Haji Romli Ikhsan dan Uti Hajjah Mahmudah sebagai Kakek dan Nenek sebagai orang tua saya yang berada di Pulau Jawa dalam memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan laporan penelitian skripsi ini.

Sebagai Dosen pembimbing utama, saya haturkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si yang selalu sabar dalam membimbing, mengajari dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan proses penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih selanjutnya saya apresiasikan kepada Bapak Rachmad Gustomy, S.IP., M.Si yang juga sebagai Dosen

pembimbing pendamping. Berkat ilmu beliau dan kesabarannya, saya dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian skripsi ini hingga terselesaikan dengan maksimal. Serta kedua dosen penguji saya, Bapak M.Lukman Hakim S.IP., M.Si dan Bapak Andi Setiawan S.IP.,M.Si yang telah membantu dalam proses terselesainya serta kelayakan penelitian skripsi ini.

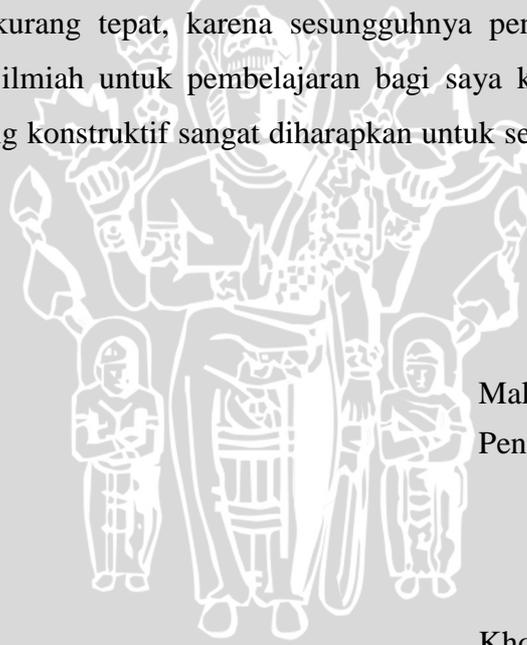
Terimakasih juga saya ucapkan kepada beberapa pejabat SKPD terutama di Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang telah membantu dan memberikan kebutuhan data-data yang dibutuhkan dalam menunjang proses penulisan laporan skripsi, terutama kepada Bapak I Gede Aryadi (Kabag Kesekretariatan dan PDE Provinsi NTB) yang mengizinkan penelitian ini terselenggara di kantor beliau. Lalu, Mas Turmuzi (Kasubbag Pemberitaan dan Komunikasi) yang selalu memberikan informasi dan tugas dari sejak saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata, hingga saat melaksanakan penelitian. Kepada Bapak Sena Puja (Kasubag Santel dan LPSE), Bapak Mursal (Mantan Kasubbag.Pemberitaan dan Komunikasi) dan Bapak Yasrul (Mantan Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan) juga peneliti ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Pada pihak media massa lokal yang membantu terselesainya penulisan laporan penelitian ini, saya juga memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Mas Alfian Yusni (Pimpinan Redaksi Lombok Post), Mas Zul Fahmi (Wartawan Lapangan *Lombokita.com*), Bapak Kusmayadi (Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB), dan Bapak Khotibul Islam (Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram) yang telah membagi beberapa informasi, pendapat, terkait dengan proses kinerja media massa, sampai dengan pemberian data-data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga proses penelitian ini berjalan lancar.

Beberapa keluarga besar dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan 2010/2011 yang memberikan sumbangsih berupa semangat serta motivasi kepada peneliti yaitu Aditya, Riszal, Fajar, Tomy, Amalia, Mega, Cysta, Firdaus, Dini, Dima, Yudistira, Riga, Dedi, Tia, Jo, Angi, Aput, Jordan, Salmon, Jojo, Hilmy, Owi, Febri, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, sangat memberikan motivasi untuk mengerjakan laporan penelitian skripsi ini.

Keluarga satu atap di Kota Malang, Kertosariro 72 yang menghibur saya selama ini yaitu Febri, Patandung, Andi, Agha, Akbar, Mas Wawan, Mas Faiq, Rizhal, Bayu, Mamet, Dani, serta teman-teman yang lain, saya ucapkan terimakasih telah menghibur dan menjadi sumber utama dalam mendengarkan keluh kesah setiap harinya. Teman-teman lama di Kota Mataram, Joko, Mirah, Gita, Nita, Diska, Kak Umam, Bang Hardian, Rara, Wieda, serta saudara saya di HOMEBAND FISIP 2010/2011, dan HIMAP 2010/2011 terimakasih sedalam-dalamnya.

Akhir kata, semoga penulisan laporan penelitian skripsi ini menjadi tonggak dan batu loncatan awal dari karir saya, yang nantinya akan menjadi kenangan. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak lain, yang terkait. Mohon maaf apabila ada penulisan laporan atau data-data yang kurang tepat, karena sesungguhnya penelitian skripsi ini hanya menjadi karya ilmiah untuk pembelajaran bagi saya ke depannya. Oleh sebab itu masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk sempurnanya skripsi ini.



Malang, 19 Mei 2014

Peneliti

Khoirul Hidayat

ABSTRACT

Khoirul Hidayat. Master Program. Governance Science. Faculty of Social Science and Political Science. Brawijaya University. Malang. 2014. Electronic Government Function and Mass Local Media Relations for Public Information Openness at NTB'S Province (Case Study at Secretarial Section and The Center of Electronic Data, The Secretary of NTB'S Province Region with Mass Media: Lombok Post and Lombokita.com). Advisor: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si and Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

E-government and mass media are two inherent things in informations pervading activity, publication, and also socialization of government. The process of pervading openness informations to society about activity transparency, and also a variety region policy is brought together in enactment of law No.14 of 2008 about public information openesses. In one hand, local government coordination with local mass media walks properly, and at any other hand, that coordination can be constrained by factor missed communication and also communication of excessive media. Good governance practice requisite the transparency in governance processes management as a whole. Government at good appreciative or bad, determined by transparency process in its leadership performing, since transparency constitutes instrument that really necessary for society, to clarification policy and performance of local government. The purpose of this research is to explain effectiveness programs of local mass media amongst Lombok Post and Lombokita.com. Then medium e-government which is selected it is namely Sms Center and Website NTB'S Province of government facet, and also the coordination with local mass media at NTB'S Province by use of qualitative research type, and many theories and concept that help which is Reinventing Government theory and Networking Governance concept in answers severally question of observational problem formula. The research is occur on Secretarial Section and The Center of Electronic Data, The Secretary of NTB'S Province Region this. It is expected can analyze the public information openness process and good governance at NTB'S Province.

Keyword : *E-Government, Local Mass Media, Public Information Openness*

ABSTRAK

Khoirul Hidayat. Program Sarjana. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. Malang. Tahun 2014. Peran *Electronic Government* dan Relasi Media Massa Lokal Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa: Lombok Post dan *Lombokita.com*). Dosen Pembimbing: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

Electronic government dan media massa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupun sosialisasi dari pemerintah. Proses Keterbukaan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Di satu sisi, koordinasi pemerintah daerah dengan media massa lokal berjalan dengan baik, dan dilain sisi, koordinasi tersebut bisa terhambat karena faktor *miss komunikasi* maupun pemberitaan dari media yang berlebihan. Praktik *good governance* menyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dinilai baik atau buruk, ditentukan oleh tingkat transparansi dalam pelaksanaan kepemimpinannya, karena transparansi merupakan instrumen yang sangat penting bagi masyarakat, dalam mengklarifikasi kebijakan dan kinerja dari pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan efektifitas penggunaan program dari media massa lokal diantaranya merupakan Lombok Post dan *Lombokita.com* serta sarana *e-government* yang dipilih yaitu *Sms Center* dan Website Provinsi NTB dari segi pemerintah, hingga koordinasi dengan pihak media massa lokal di Provinsi NTB dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta beberapa teori dan konsep yang membantu yaitu Teori *Reinventing Government* dan Konsep *Networking Governance* dalam menjawab beberapa pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Penelitian yang berlangsung pada Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB ini, diharapkan dapat membantu menganalisis proses keterbukaan informasi publik dan *good governance* di Provinsi NTB.

Kata Kunci: *E-Government, Media Massa Lokal, Keterbukaan Informasi Publik*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
GLOSARIUM	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Akademis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi Keterbukaan Informasi Publik	8
2.2 Konsep <i>Networking Governance</i> (Wayne R. Leach)	10
2.3 Teori <i>Reinventing Government</i> (David Osborne)	11
2.4 Studi Penelitian Terdahulu	13
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Jenis Data	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	22

3.3.1 Observasi	22
3.3.2 Wawancara	23
3.3.3 Dokumentasi dan Studi Literatur	25
3.4 Teknik Analisis Data	26
3.5 Lokasi Penelitian	31
3.6 Sistematika Penulisan	32
BAB IV MENJALIN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH	
PROVINSI NTB DAN MEDIA MASSA LOKAL	35
4.1 Program <i>E-Government</i> Sekretariat Daerah Provinsi NTB	35
4.1.1 Profil <i>Sms Center</i> Sekretariat Daerah Provinsi NTB	36
4.1.2 Profil Website Sekretariat Daerah Provinsi NTB	39
4.1.3 <i>E-Procurement</i> Sekretariat Daerah Provinsi NTB	42
4.2 Media Massa Lokal Provinsi NTB	45
4.2.1 <i>Lombokita.com</i>	47
4.2.2 Lombok Post	50
BAB V RELASI DAN PENCAPAIAN EFEKTIFITAS	
PENGUNAAN PROGRAM <i>E-GOVERNMENT</i> DENGAN	
MEDIA MASSA LOKAL	53
5.1 Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi dan Informasi	54
5.1.1 Proses dan Bentuk Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal	57
5.1.2 <i>Sms Center</i> dalam Menjembatani Partisipasi Masyarakat Kepada Pemerintah	60
5.1.3 Berita <i>Online</i> Sebagai Bentuk Transparansi Informasi Kepada Masyarakat	66
5.1.4 Implementasi Relasi Pemerintah dan Pihak Swasta Melalui Program <i>E-Procurement</i>	70
5.1.5 Capaian Tipe Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal dan Masyarakat	72
5.2 Efektifitas Penggunaan Program <i>E-Government</i> dan Media Massa Lokal dalam Keterbukaan Informasi Publik	75

5.2.1 Membaca Keterbukaan Informasi Publik dan Relevansinya Terhadap Beberapa Aspek Pendukung	77
5.2.2 Program Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi Informasi..	80
5.2.3 Publikasi Informasi Kepada Masyarakat Sebagai Urgensi Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah	82
5.2.4 Faktor Demokratisasi Dalam Membaca Pencapaian Koordinasi <i>E-Government</i> dan Media Massa Lokal	84
5.2.5 Transparansi Program <i>E-Government</i> Terhadap Korelasinya Kepada Media Massa Lokal	86
BAB VI PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan	88
6.1.1 Capaian Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal	88
6.1.2 Capaian Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik	90
6.2 Rekomendasi	91
6.2.1 Rekomendasi Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik.....	91
6.2.2 Rekomendasi Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal	92
6.2.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	xxiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Publikasi Informasi Penggunaan <i>Sms Center</i> dari Bulletin Bulanan Pemerintah Provinsi NTB	37
Gambar 4.2 Website Provinsi NTB	39
Gambar 4.3 Website LPSE <i>E-Procurement</i> Pemerintah Provinsi NTB	43
Gambar 4.4 Website <i>Lombokita.com</i>	48
Gambar 4.5 Koran Lombok Post Edisi 22 Februari 2014	50
Gambar 5.1 Isi <i>Sms Center</i> Gubernur Menjawab	65
Gambar 5.2 Berita Website Provinsi NTB “ <i>Core Even Bau Nyale</i> ”	67
Gambar 5.3 Berita Website PPID Provinsi NTB	68
Gambar 5.4 Publikasi Informasi Lelang <i>E-Procurement</i>	71
Gambar 5.5 Kolom Pertanyaan Website LPSE <i>E-Procurement</i> Pemerintah Provinsi NTB	72
Gambar 5.6 Contoh Postingan Isi <i>Sms Center</i> pada Media Massa Cetak Lombok Post	87
Gambar 5.7 Postingan Laman Website Provinsi NTB pada <i>Lombokita.com</i>	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Penelitian Terdahulu terhadap Relevansi Penelitian	16
Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian dan Informasi yang dibutuhkan	24
Tabel 3.2 Tabulasi Metode Analisis Data	29
Tabel 4.1. Jenis Media Massa Lokal di Provinsi NTB	46
Tabel 4.2 Fitur Lombok Post yang tergolong dalam Unsur Keterbukaan Informasi Publik	51
Tabel 5.1 Bentuk Relasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Media Lokal melalui Forum Wartawan Pemprov NTB	58
Tabel 5.2 Kriteria Isi <i>Sms Center</i> Provinsi NTB	61
Tabel 5.3 Relasi Pemerintah Provinsi NTB dan Swasta melalui Program <i>E-Procurement</i>	71
Tabel 5.4 Program Relasi <i>E-Government</i> dan Media Lokal dalam Unsur Pendukung Konsep <i>Networking Governance</i>	81
Tabel 5.5 Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik dalam Fungsi Otonomi Daerah	83
Tabel 5.6 Faktor Pendorong Demokrasi dalam Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik	85
Tabel 5.7 Bentuk Implementasi Transparansi <i>E-Government</i> dengan Media Massa Lokal	86

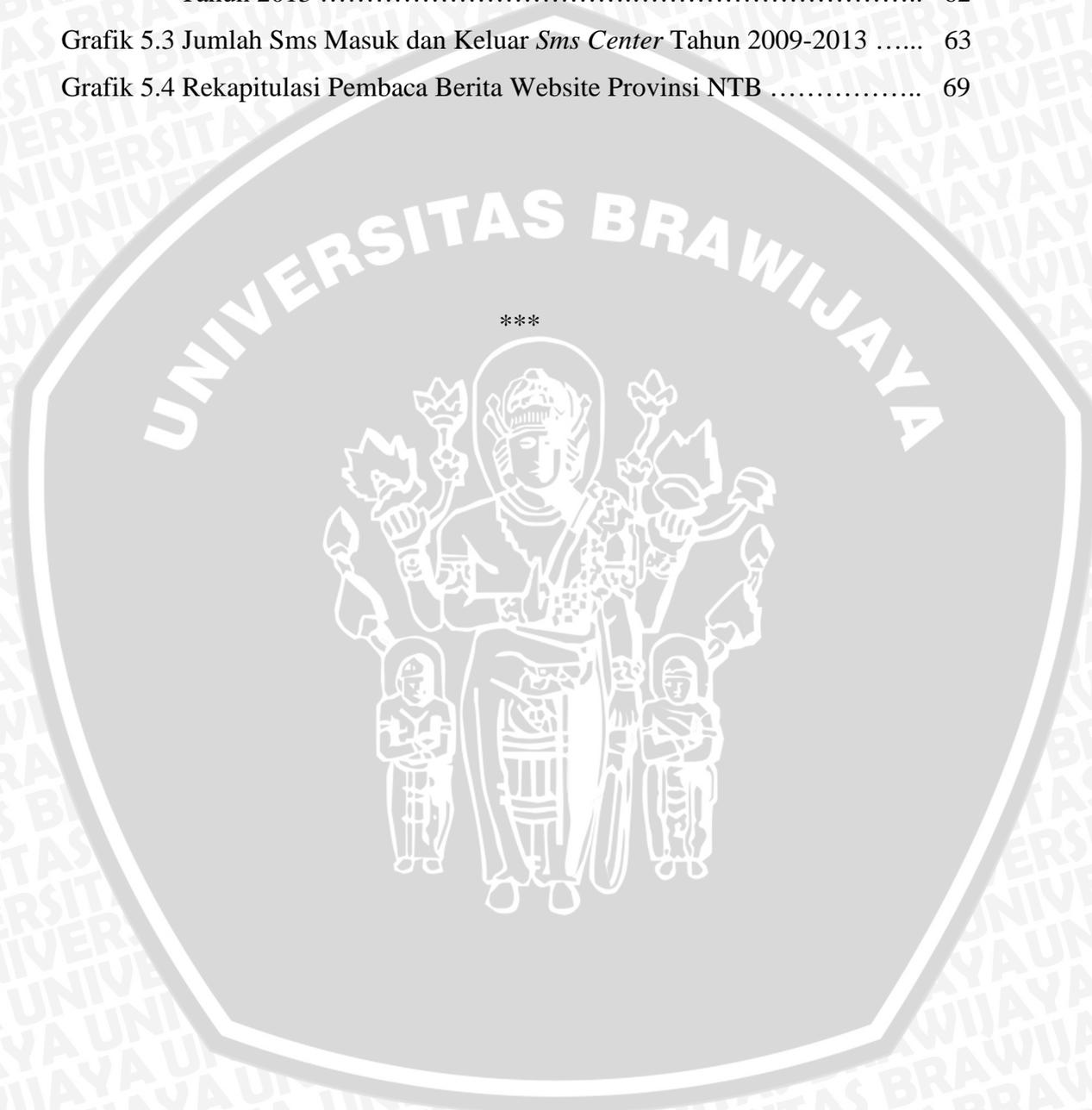
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Aktor-Aktor Pembentuk <i>Networking Governance</i>	11
Bagan 2.2 Relasi <i>E-Government</i> dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	12
Bagan 2.3 Pembagian Variabel <i>Reinventing Government</i>	13
Bagan 2.4 Kerangka Pikir Penelitian	18
Bagan 3.1 Bagan Teknik Analisis Data	27
Bagan 4.1 Alur <i>Sms Center</i> Provinsi NTB	37
Bagan 4.2 Proses <i>E-Procurement</i> Pemerintah Provinsi NTB	43
Bagan 5.1 Skema Pengawasan <i>E-Government</i> dan Media Massa Lokal NTB	55
Bagan 5.2 Proses Alur <i>Sms Center</i>	64
Bagan 5.3 Skema Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik	76



DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Rekapitulasi Jumlah Kriteria Isi <i>Sms Center</i> Tahun 2013	61
Grafik 5.2 Jumlah Rekapitulasi <i>Sms</i> Masuk dan Keluar <i>Sms Center</i> Tahun 2013	62
Grafik 5.3 Jumlah <i>Sms</i> Masuk dan Keluar <i>Sms Center</i> Tahun 2009-2013	63
Grafik 5.4 Rekapitulasi Pembaca Berita Website Provinsi NTB	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Informan Penelitian
- Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian
- Lampiran 4. Lembar Monitoring dengan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5. Lampiran Dokumentasi Penelitian



GLOSARIUM

- BIKD** : Badan Informasi dan Komunikasi Daerah berfungsi mengawasi peningkatan akses dan kualitas pelayanan infokom (informasi dan komunikasi) terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
- Dikpora** : Dinas Pendidikan dan Olahraga bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- Dishubkominfo** : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- DPR** : Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
- E-Government** : Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- E-Procurement** : Sistem aplikasi berbasis Internet yang menawarkan proses order pembelian secara elektronik dan meningkatkan fungsi-fungsi administrasi untuk pembeli dan pemasok, guna efisiensi biaya.
- E-Catalogue** : Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik, atau sistem katalog elektronik yang sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- FISIPOL** : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik merupakan fakultas yang membawahi beberapa jurusan, dan program studi

seperti Ilmu Komunikasi, Hubungan internasional, Ilmu Politik, Psikologi, Sosiologi, dan Ilmu Pemerintahan

FKPD : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang memiliki fungsi strategis bagi pembangunan suatu daerah. Pasalnya, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan daerah, produk hukum daerah yang menjadi dasar bagi pembangunan daerah tidak akan bertentangan dengan hukum.

FM : *Frequency Modulation* adalah proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa sehingga frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) gelombang sinyal informasi. Biasa dicantumkan pada gelombang radio.

FWP : Forum Wartawan Pemerintah Provinsi yaitu lembaga non formal yang dibentuk dalam mempermudah proses wartawan/pers untuk mengakses informasi dari pihak pemerintah provinsi

http : *Hyper Text Transfer Protocol* adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dengan menggunakan hipermedia.

IC : *Islamic Center* adalah sebuah istilah dari program kerja Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan masjid besar *Islamic center*.

ICT : *Information Communication Teknologi* adalah Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

INAPROC : Menyediakan informasi rencana pengadaan; menyediakan informasi pengumuman pengadaan; dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Kabag : Singkatan dari Kepala Bagian.

Kasubag : Singkatan dari Kepala Sub Bagian.

KPU : Komisi Pemilihan Umum yaitu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia.

- LPP** : Lembaga Penyiaran Publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- LSM** : Lembaga Swadaya Masyarakat sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
- NTB** : Nusa Tenggara Barat sebuah Provinsi di Indonesia yang diapit oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali.
- PDE** : Pusat Data Elektronik memberikan pelayanan informasi pemerintah, menyaring, menganalisa informasi dan menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan aktual masyarakat.
- Pemda** : Pemerintah Daerah yaitu penyelenggara pemerintahan tingkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Pemprov** : Pemerintah Provinsi yaitu penyelenggara pemerintahan tingkat provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Perda** : Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

- Pergub** : Peraturan Gubernur adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
- Perpres** : Peraturan Presiden yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
- Pijar** : Program kerja dari Pemerintah Provinsi NTB kepada bidang tertentu seperti Sapi Jagung Rumput Laut.
- Pimred** : Pimpinan Redaksi adalah orang yang mampu manajemen Sumber Daya Manusia dengan baik dan mempunyai pengalaman dan pemahaman tinggi pada industri jurnalistik.
- PNS** : Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PPID** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang Pelayanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- PWI** : Persatuan Wartawan Indonesia adalah organisasi profesi sekaligus organisasi wartawan pertama di Indonesia, yang memiliki tugas sebagai lembaga resmi sebagai naungan pers/wartawan di Indonesia sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999 mengenai Pers.
- Santel** : Sandi dan Telekomunikasi adalah penyelenggaraan urusan kesandian, telekomunikasi dan jaringan serta pelaksanaan sarana kelistrikan di lingkungan sekretariat daerah.
- SDM** : Singkatan dari Sumber Daya Manusia.
- Sekda** : Sekertaris Daerah berfungsi membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas daerah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Setda : Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

SDP : Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

SIP : Sistem Informasi Publik yaitu sistem yang dibuat secara kompleks untuk kepentingan masyarakat luas, di mana masyarakat yang menginginkan informasi dari pemerintah dapat mengakses sistem ini.

SIRUP : Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan

SK : Surat Keputusan adalah surat yang menyatakan sebuah keputusan dari pihak yang berwenang dan kemudian ditujukan kepada pihak terkait.

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik

SMS : *Short Message Services* sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah ponsel untuk mengirim dan menerima pesan pendek.

SOP : *Standard Operational Prosedur* adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis.

Tupoksi : Singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi biasanya sebagai acuan kerja dari Pegawai Negeri Sipil.

UU : Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya yang digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk

menganjurkan, untuk menyediakan dana untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

VOA : *Voice of America* adalah siaran multimedia (radio, televisi dan internet) milik pemerintah Amerika Serikat, yang menyiarkan beragam program dalam 53 bahasa termasuk Indonesia.

www : *world wide web* suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna.

Website : halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berjalannya proses keterbukaan informasi publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya memiliki peranan penting terhadap keterlibatan media massa yang turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Terselenggaranya akses informasi dan publikasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat dibutuhkan, terkait proses demokrasi yang menjadi hal utama dalam menelaah pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupun sosialisasi dari kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakatnya memang masih memiliki beberapa kendala. Permasalahan mengenai proses komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, seperti minimnya akses informasi kepada publik, menjadikan pemerintah dan media massa menjalin relasi/kerjasama yang nantinya akan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal senada didukung oleh pernyataan Tamburaka & Rianto (2012) sebagai berikut:

“Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar mempengaruhi opini publik. Melalui fungsi agenda setting, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadi luar biasa penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa”.¹

“Reformasi pemerintahan sebagaimana terjadi di Indonesia pada akhir tahun 90-an yang lalu, menunjukkan bahwa tuntutan aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi tidak dikesampingkan lagi untuk menjadi perhatian utama”.²

¹ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm.7

² Budi Rianto, *Aplikasi E-government Dalam Pelayanan Publik*, Surabaya: PMN, 2012, Hlm.32

Proses penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, menyangkut hak asasi manusia dalam memperoleh informasi, serta mewujudkan ciri penting di dalam aspek negara yang demokratis.³

Di satu sisi, koordinasi antar pemerintah daerah dengan media massa lokal tersebut berjalan dengan baik dan disisi lain, kegiatan koordinasi tersebut bisa jadi terhambat karena kesalahan teknis maupun pemberitaan media massa yang berlebihan, serta banyaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Praktik *good governance* juga mengisyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. *Governance* dinilai baik atau buruk, antara lain ditentukan oleh unsur transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.⁴

Rendahnya kualitas pelayanan publik pada era reformasi di Pemerintah Daerah, merupakan sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal serupa, terjadi pada Provinsi NTB, yang dalam implementasi keterbukaan informasi publik, masih menuai kejanggalan, baik dalam distribusi informasi, penyelenggaraan akses publikasi, hingga informasi yang terkadang masih ditutupi. Permasalahan ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena Pemerintah Provinsi NTB tergolong baru melaksanakan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya.

³ UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik

⁴ *Ibid.*, Hlm.12

Meminjam pendapat Rogers, era reformasi saat ini dapat dikategorikan sebagai era komunikasi interaktif (*interactive communication*)⁵. komunikasi interaktif memiliki pengertian bahwa media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan, transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), transfer informasi, bahkan komunikasi dapat dilakukan media massa.

Program yang diselenggarakan untuk menunjang keterbukaan informasi publik mengacu pada 3 (tiga) program *e-government* serta koordinasi dengan beberapa media massa. Program *e-government* yang *Pertama*, adalah *Sms Center*. Sama halnya seperti *sms gateway* ataupun *sms* lainnya, *sms center* bekerja dengan mengirimkan pesan kepada nomor yang disediakan Pemerintah Provinsi NTB.

Program *sms center* ini dinilai efektif serta mudah dijangkau oleh masyarakat, terkait dengan beberapa keluhan, komentar, kritik, saran, pengaduan, maupun pertanyaan yang ditujukan langsung kepada instansi, atau kepada kepala daerah terkait, yang terkontrol ke dalam satu nomor, dan dikelola oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Provinsi NTB. Cukup dengan mengirimkan *sms* ke nomor 0811391300⁶, masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah.

Dalam pembahasan *sms center* ini, penelitian difokuskan pada satu instansi yaitu Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Khususnya pada Bagian Kesekretariatan dan PDE yang memiliki fungsi kontrol terhadap SKPD di Provinsi NTB. Beberapa kepentingan masyarakat NTB dalam *sms center* Setda Provinsi NTB meliputi beberapa kepentingan, seperti: penyalahgunaan wewenang (kolusi), kewaspadaan nasional, pelayanan masyarakat, dan sebagainya.

⁵ Anandya Abrar, *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, Hlm.17

⁶ Nomor tersebut disesuaikan dengan nomor telepon seluler pada umumnya, yang nantinya akan dibalas oleh Dinas/SKPD ataupun Gubernur secara langsung kepada nomor tujuan, setiap hari Senin, dan melalui beberapa perantara lainnya.

Program *kedua* adalah Website, yang merupakan alat komunikasi (yang menggunakan media internet) dalam pendistribusiannya serta berisi kumpulan beberapa halaman situs yang biasa terangkum dalam subdomain *www* atau *http*. Dalam pembahasan *e-government* ini, dijelaskan fungsi website dalam penyebarluasan informasi, publikasi, serta kegiatan Pemerintah Provinsi NTB.

Contoh dari website semisal <http://ntbprov.go.id> yaitu website Sekretariat Daerah Provinsi NTB, lalu <http://dikpora.ntbprov.go.id/> yaitu website Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi NTB. Website tersebut berisi kegiatan publikasi aktivitas, serta *contact person* serta informasi mengenai Dinas tersebut. Sesuai dengan laporan *e-government* 2013 Setda Provinsi NTB, fungsi website sebagai berikut:⁷

- a. Menyediakan berbagai informasi mulai dari gambaran umum tentang Provinsi NTB, agenda Gubernur & Wakil Gubernur, berita seputar kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh SKPD, produk hukum dan sebagainya;
- b. Website ini merupakan portal utama dari domain yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, sesuai ketentuan website milik SKPD menjadi sub domain dari domain utama.

Program yang *Ketiga*, merupakan program *e-procurement*. Program ini sesungguhnya tidak termasuk dalam program keterbukaan informasi publik, melainkan dalam program yang mengantarkan pemerintah melalui *networking governance*-nya, kepada pihak swasta. *E-procurement* bermanfaat dalam membantu program kerja pemerintah terutama dalam konteks infrastruktur, berupa materi yang diakses melalui website, sehingga pihak swasta bisa memposting produk barang/jasa mereka.

⁷ *Ibid.*, Hlm.8

Keempat, program dari media massa sendiri, yaitu media massa lokal. Media massa lokal tentunya tidak bisa terlepas sebagai aktor dari sumber informasi dan proses pembentukan aspirasi masyarakat. Media massa juga banyak menggunakan *bahasa* mereka sendiri dalam mempublikasikan informasi seperti berita *online*, hingga berita media cetak. Namun, media massa yang dimaksudkan disini adalah media massa yang menjadi mitra dari instansi Setda NTB, yaitu wartawan dari media massa lokal yang *nge-pos*⁸ di Bagian Humas dan Protokol.

Media massa ini, juga terdiri dari berbagai jenis media. Namun media massa dipilih merupakan media yang menjalin relasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan berkaitan langsung dengan program *e-government* dari Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Media massa tersebut antara lain seperti *Lombok Post*, *Radar Lombok*, dan *Suara NTB* mewakili media cetak (koran). *Antaraneews.com*, *Lomboknews.com* dan *Lombokita.com* mewakili media *online*.⁹

Dari ke 4 (empat) pemamparan program keterbukaan informasi publik di atas, dapat disimpulkan bagaimana berjalannya aspek transparansi informasi, publikasi, serta komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi NTB, sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu beberapa kekurangan terhadap permasalahan ketidakpuasan, ataupun persepsi masyarakat NTB terhadap pemerintah terhadap pelayanan publik yang kurang maksimal serta mengacu kepada faktor *clean government* yang diharapkan.

⁸ *Nge-Pos* dimaksudkan sebagai perkumpulan dari beberapa wartawan-wartawan yang membentuk komunitas di Setda NTB, dan bertugas menjalin kerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol Setda NTB untuk saling bertukar Informasi, Publikasi, dari kegiatan-kegiatan Instansi maupun di bawah Instansi Setda NTB, hingga kegiatan dari Kepala daerah (Gubernur, Wagub, Sekda, Walikota), sehingga kerjasama yang dijalin saling menguntungkan.

⁹ Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi mengenai data wartawan media massa Setda NTB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang seperti yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan, ada 2 (dua) pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimana relasi antara Pemerintah Provinsi NTB melalui *e-government* dengan media massa lokal dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB?
- b. Bagaimana efektifitas penggunaan program *e-government* dengan relasi media massa lokal terhadap keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB?

1.3 Tujuan Penelitian

Terlaksananya penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membahas proses mekanisme kinerja dari program *e-government* yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB maupun mekanisme kinerja dari media massa lokal yang mengarah kepada relasi kedua belah pihak dalam proses keterbukaan informasi publik.
- b. Menjelaskan efektifitas penggunaan program *e-government* dengan relasinya melalui media massa lokal yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam proses keterbukaan informasi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis:

- a. Sebagai penambah referensi terbaru mengenai sarana keterbukaan informasi publik terutama di pemerintahan daerah.
- b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, yang mengkaji tentang keterbukaan informasi publik melalui *e-government* dan media massa lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Sebagai referensi bagi masyarakat NTB dalam menelaah program Pemerintah Provinsi NTB untuk menyebarluaskan informasi, publikasi dan menjalin komunikasi.
- b. Mengoptimalkan program-program yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui penelitian dan menganalisis kelemahan yang ditimbulkan dengan menggunakan bahasa akademis.
- c. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan dengan merefleksikannya ke dalam aspek-aspek komunikasi, demi terselenggaranya *good governance* Pemerintah Provinsi NTB. ***

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 (dua) ini, akan dijelaskan beberapa poin-poin penting terkait pemaparan aspek penunjang dalam membandingkan penelitian yang dilakukan, dengan penelitian terdahulu. Ada 5 (lima) sub bab yang akan dijelaskan, yaitu keterbukaan informasi publik, konsep *Networking Governance*, *Reinventing Government* sebagai *grand teori*, lalu penelitian terdahulu sebagai pembanding, serta kerangka pikir penelitian. Dari beberapa poin tersebut, tentunya diharapkan dapat membantu dalam menganalisis kerangka teoritik dari keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.

2.1 Definisi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penyelenggaraan asas transparansi informasi, mengenai publikasi, baik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, berita-berita, hingga informasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakatnya sudah tercantum sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

¹⁰ Pasal 2 Bab II Bagian Pertama UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik

Dari beberapa pemaparan pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan yang mengisyaratkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan sistem informasi, dan menyelenggarakan program informasi publik dengan akurat, efisien, serta akuntabel. Pelayanan publik yang diberikan tentunya dibuat untuk bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik melalui media-media pemerintah tersebut secara langsung, maupun dengan relasi-relasinya melalui pihak media massa. Tentunya, maksud dari pelayanan publik tersebut juga menggambarkan pihak pemerintah tidak membiarkan masyarakat untuk buta terhadap segala informasi yang sejatinya telah diberikan.

Program keterbukaan informasi publik¹¹ dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa program yang dibuat oleh media massa sesuai dengan unsur keterbukaan informasi publik yang sesuai pula dengan judul yang dibahas oleh peneliti. Program yang dibahas tentunya memiliki unsur komposisi yang sama dengan unsur *e-government* secara umum. Program tersebut antara lain:

Pertama program *sms center* yang dicetuskan oleh Gubernur NTB tersebut bermaksud mengatasi kritikan hingga pendapat dari masyarakat kepada pemerintah. *Kedua*, mengenai informasi baik dalam bentuk berita, maupun pengumuman berdasarkan koneksi dengan jaringan internet (*online*) melalui website yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB. *Ketiga*, mengenai program yang memiliki unsur dalam keterbukaan informasi publik oleh ke-2 (dua) media massa yang berbeda dan terdapat di Provinsi NTB, seperti media cetak, dan media *online* tersebut dalam penyebarluasan informasi dan menjalin komunikasi.

¹¹ Program ini merupakan beberapa program-program yang tergolong dalam program keterbukaan informasi publik, yang sesuai dengan unsur-unsur serta mendasari kepada kriteria proses penyebaran informasi publik, misalkan *sms center*, website Provinsi NTB, *e-procurement*, dsb.

2.2 Konsep *Networking Governance* (Wayne R. Leach)

Networking governance dimaksudkan sebagai akses dari pemerintah daerah dan kerjasama yang terjalin antar pemerintah daerah dengan berbagai pihak non pemerintah untuk menyebarkan serta melancarkan beberapa kebijakan, baik informasi, publikasi, maupun mengkomunikasikan kegiatannya kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pihak *non* pemerintah dalam penelitian ini merupakan media massa lokal dan pihak swasta.

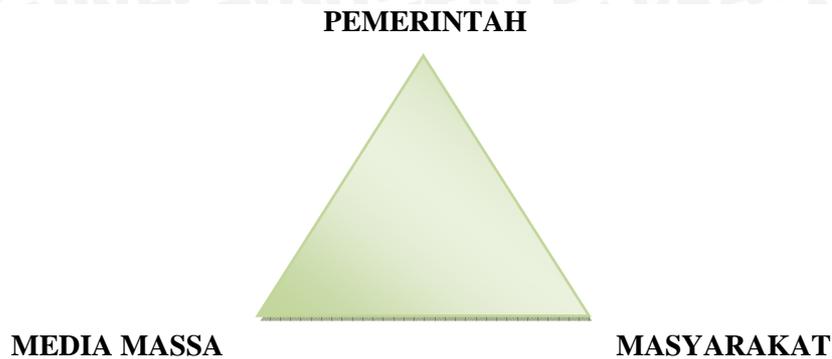
Media massa lokal dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk melancarkan implementasi program, melalui koordinasi yang terjalin dan nantinya akan dikonsumsi masyarakat, melalui gaya penulisan dan bahasa dari media massa tersebut. *Networking governance* termasuk dalam kriteria *good governance* dan diharapkan mampu mengkaji permasalahan mengenai jalinan relasi antara pemerintah dengan pihak media massa lokal.

Kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat penting untuk memahami persoalan transparansi dan akuntabilitas interaksi *networking*/jaringan aktor dalam *governance*. Dalam konsep *networking governance*, *trust* (kepercayaan) menjadi kunci dan *network* sebagai kata kunci *governance*. Prinsip dari unsur pembentuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas aktor *governance* sangat terkait dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, yang menjadi tujuan dari terlaksananya konsep tersebut.¹²

Selain unsur pembentuk dari konsep tersebut, *networking governance* juga dikategorikan dari aktor yang nantinya akan melaksanakan proses keterbukaan informasi publik tersebut. Aktor tersebut sebagai berikut:

¹² Hetifah J. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm.15

Bagan 2.1 Aktor-Aktor Pembentuk *Networking Governance*¹³



Sumber: Wayne R. Leach (2001)

Dari 3 (tiga) aktor di atas menunjukkan relasi yang nantinya akan dijalin oleh pemerintah dan media massa menjadikan masyarakat sebagai aktor yang diutamakan dalam menyelenggarakan proses keterbukaan informasi publik. Tingkat keberhasilan relasi yang dihasilkan akan menjadi tolak ukur bagaimana pemerintah menyelenggarakan proses publikasi dan transparansi guna mencapai kinerja dengan baik, berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan, keluhan, saran, kritik, laporan, hingga pertanyaan secara langsung kepada pemangku kebijakan/*stakeholder*.

2.3 Teori *Reinventing Government* (David Osborne)

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka *e-government* di definisikan sebagai sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. ICT (*Information and Communication Technology*) adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi, sesuai dengan unsur *e-government*.

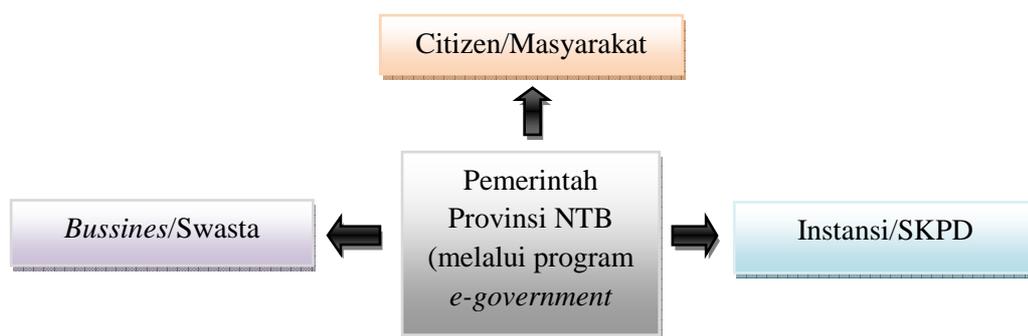
¹³ Dedy Hermawan, *Trust and Network Governance: Transparan dan Akuntabel*, Malang: Administrasi Negara, 2008, hlm.2

Menurut David Osborne (1992), *reinventing government* merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas pemerintah dengan transformasi teknologi informasi, komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) melalui internet. Klasifikasi pelayanan lebih difokuskan kepada pasar, persaingan serta program pilihan pelanggan yang memungkinkan pelanggan bisa memilih produk atau jasa yang diinginkan.¹⁴

Jika direfleksikan dalam penggunaan kegiatan *e-government*, teori tersebut mendefinisikan masyarakat sebagai *konsumen*, dan pemerintah sebagai *produsen*, serta menjadikan akses birokrasi ke dalam kategori *mewirauahakan birokrasi*.¹⁵

Pelaksanaan *reinventing government* pada pemerintah daerah adalah mentransformasi *ICT* dalam pelayanan publik dan penerapan konsep *reinventing government* pada instansi pemerintah. Penelitian ini juga menjelaskan 3 (tiga) jenis *e-government* yaitu *G2C, Government to Citizen* (Pemerintah kepada masyarakat) dan *G2B, Government to Bussines* (Pemerintah kepada swasta), dan *G2G, Government to Government* (Antar Pemerintah)¹⁶

Bagan 2.2 Relasi E-Government dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik



Sumber: David Osborne (1992)

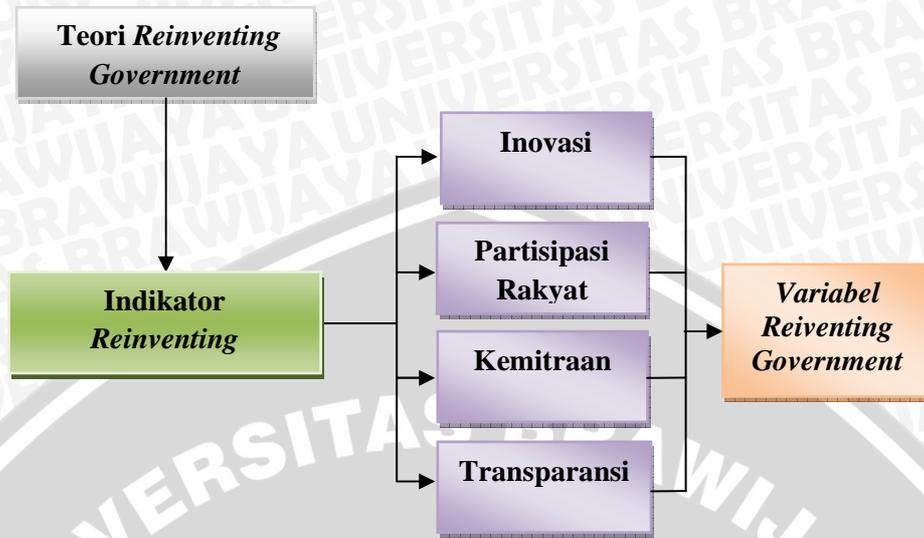
¹⁴ Asep Arifin, *Pengaruh Reinventing Local Government dan E-government Terhadap Good Governance*, Bandung: Unpad, 2011. Hlm.6

¹⁵ David Osborne, *Mewirauahakan Birokrasi: Reinventing Government*, Jakarta: Perwajahan Lembaga PPM, 2005. Hlm.127

¹⁶ Richardus Eko, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publk Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006, Hlm.44



Bagan 2.3 Pembagian Variabel *Reinventing Government*



Sumber: Diadaptasi dari David Osborne (1992)

Dari pembagian variabel di atas, peneliti nantinya akan menjelaskan efektifitas dari ke 4 (empat) variabel, dengan menggunakan beberapa penjelasan dengan sub bab terkait penilaian seberapa efektif penggunaan program dari *e-government* dan relasinya dengan 2 (dua) media massa lokal, yakni Lombok Post dan *Lombokita.com*.

2.4 Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai aspek *e-government* dan penggabungannya dengan relasi media massa lokal, memang bukanlah suatu hal yang baru. Diantara beberapa tulisan, baik berupa buku penunjang, skripsi dari berbagai universitas, hingga jurnal-jurnal inovasi pemerintahan, beberapa diantaranya sangat kerap kita dengar menggunakan faktor *e-government* sebagai judul utama. Dari hal inilah, dimunculkannya studi terdahulu yang berfungsi untuk membandingkan beberapa tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan.



Dalam menjelaskan studi terdahulu, peneliti membandingkan setidaknya 5 (lima) literatur yang berasal dari penelitian skripsi, tesis, hingga jurnal penelitian, yang akan dijelaskan satu-per satu sebagai berikut:

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mega Sofiana dalam skripsinya “*Aktivasi dan Penyempurnaan Website Sebagai Media Komunikasi Eksternal Lembaga Paramita Jawa Timur*”¹⁷ Tahun 2010. Dalam penelitian skripsi ini dijelaskan spesifikasi pada program-program inovatif dari pemanfaatan teknologi jangkauan dari lembaga swadaya masyarakat (Paramita) dan pemanfaatan website sebagai program yang inovatif. Selain itu, website juga menawarkan beberapa program seperti: *best practice*, berita, dan artikel.

Pertama, yaitu studi yang dilakukan oleh Eko Sakapurnama, dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “*Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta)*”¹⁸ Tahun 2011. Pada dasarnya penulisan karya ilmiah ini membahas mengenai implementasi dan capaian-capaian dari keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah, namun dengan menggunakan unsur *good governance* serta implementasi kebijakan. Perbedaan lain juga terdapat pada tidak adanya media massa serta penekanan yang secara mendalam kepada unsur *good governance*.

¹⁷ Mega Sofiana, *Aktivasi Dan Penyempurnaan Website Sebagai Media Komunikasi Eksternal Lembaga Paramita Jawa Timur*, Malang: Fisip Universitas Brawijaya, 2012, (63 Hlm)

¹⁸ Eko Sakapurnama, *Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Lombok Barat Dan Kota Surakarta)*, Jakarta: Universitas Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Riset Unggulan, 2011, (26 Hlm)

Ketiga, adalah tulisan yang diprakarsai oleh Muhtar Haboddin¹⁹, yaitu “*Gubernur NTB Menjawab*” Tahun 2013. Tulisan yang berbentuk Jurnal ini, menjelaskan *e-government* yang digagas oleh pemerintah NTB yaitu *sms center*, dan media cetak lokal, Lombok Post. Penulisan jurnal ini juga menjelaskan partisipasi Gubernur dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat NTB. Perbedaan terletak pada media massa lokal yang dipilih yaitu media cetak, sedangkan peneliti memilih 2 (dua) media massa yang berbeda.

Keempat, yaitu penelitian tesis Magister Hukum Universitas Mataram oleh Moh.Zar Kasyi yang berjudul “*Fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah dalam Mewujudkan Hak Informasi Masyarakat berdasarkan Perda No.10/2000*”²⁰ Tahun 2006. Penelitian tesis ini, menjelaskan fungsi dan kinerja dari BIKD dalam mengelola informasi publik, mengkaji sejauh mana efektifitas informasi yang diberikan oleh BIKD kepada masyarakat NTB. Namun, penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum normatif dan doktrinal data sekunder saja.

Kelima, adalah penelitian skripsi yang berjudul “*Penyempurnaan Media Public Relations Cetak dan Elektronik di Yayasan Micra Indonesia*”²¹ Tahun 2013 yang dilakukan oleh Anggun Evelia Restanti. Pada penelitian tersebut, dijelaskan beberapa program mengenai pemanfaatan sarana internet dalam menawarkan program menarik oleh yayasan Micra Indonesia, yaitu yayasan yang bergerak pada keuangan makro. Dengan Program *newsletter*, bulletin, pada website yayasan.

¹⁹ Muhtar Haboddin, *Gubernur NTB Menjawab*, Yogyakarta: IGI, 2013, (14 Hlm)

²⁰ Moh.Zar Kasyi, *Fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Dalam Mewujudkan Hak Informasi Masyarakat Berdasarkan Perda No.10/2006*, Mataram: Universitas Mataram, 2006, (118 Hlm)

²¹ Anggun Evelia Restianti, *Penyempurnaan Media Public Relations Cetak Dan Elektronik di Yayasan Micra Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013, (84 Hlm)

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Penelitian Terdahulu terhadap Relevansi Penelitian

Peneliti	Bentuk Penelitian	Judul	Letak Perbedaan
Zar Kasyi (2006)	Tesis	Fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah dalam mewujudkan Hak Informasi Masyarakat berdasarkan Perda No.10/2000”	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, analisa metode interpretasi hukum dan perundang-undangan.
Eko (2011)	Skripsi	“Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> (Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta)”	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis unsur-unsur <i>good governance</i> secara keseluruhan. • Implementasi kebijakan. • Prosedur dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Sofiana (2010)	Skripsi	“Aktivasi dan Penyempurnaan Website Sebagai Media Komunikasi Eksternal Lembaga Paramita Jawa Timur”	<ul style="list-style-type: none"> • Program-program <i>e-government</i> inovatif dan menggunakan media <i>online</i>. • Analisis program <i>e-government</i> hanya pada media massa <i>online</i> (website).
Muhtar (2013)	Jurnal	“Gubernur NTB Menjawab”	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek media massa lokal khususnya hanya menggunakan media cetak • Fungsi <i>sms center</i> dominan.
Restanti (2013)	Skripsi	“Penyempurnaan Media <i>Public Relations</i> Cetak dan Elektronik di Yayasan Micra Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dari 2 program media hubungan masyarakat. • Lembaga donor/yayasan.

Sumber : Data Primer di Olah (2014)

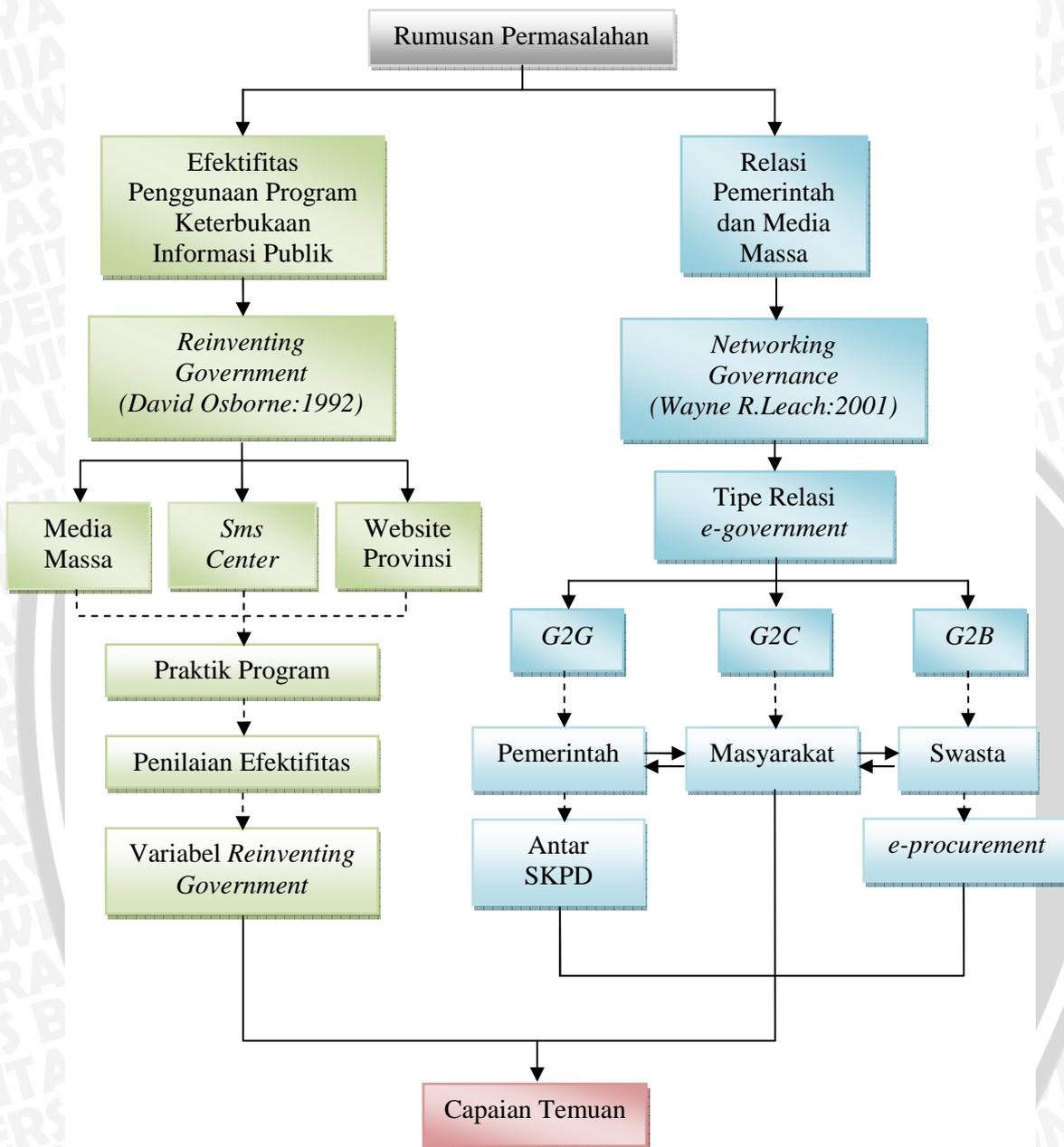
Dari beberapa perbandingan studi terdahulu di atas, disimpulkan Jurnal Muhtar Haboddin yang berjudul “*Gubernur NTB Menjawab*” Tahun 2012 yang dirasa menyerupai. Hal tersebut dapat dinilai dari program yang digunakan, yaitu *sms center* dan website, serta media cetak Lombok Post. Perbedaan terletak pada 3 (tiga) unsur, *Pertama*, efektifitas keterbukaan informasi publik menurut UU No.14 Tahun 2008. *Kedua*, fungsi website oleh pemerintah Provinsi NTB untuk menyebarluaskan berita dan informasi. *Ketiga*, media massa yang dibahas merupakan jenis media lokal yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Dari penjelasan mengenai kaitan hubungan antara konsep *networking governance* sebagai acuan pemerintahan yang berlandaskan 3 (tiga) aktor utama (masyarakat, pemerintah dan media massa lokal) dan teori *reinventing government* sebagai *grand teori* yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti juga akan menggambarkan bagaimana membangun proses kerangka pikir dalam menyusun penelitian ini, sehingga berjalan sesuai dengan rumusan-rumusan permasalahan penelitian yang dipertanyakan.

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir penelitian yang akan ditawarkan, di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan dari terbentuknya rumusan masalah antara efektifitas penggunaan program *e-government* dan media massa lokal dengan relasi antar media massa lokal dan pemerintah hingga hasil temuan yang dihasilkan dari implementasi teori dan konsep pada bagan 2.4 berikut:

Bagan 2.4 Kerangka Pikir Penelitian²²



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

²² Kerangka Pikir Penelitian menjelaskan hubungan antara kedua rumusan masalah dari penelitian, yaitu efektifitas yang dibaca dengan menggunakan teori *reinventing government* dan relasi pemerintah dengan media massa lokal dengan menggunakan konsep *networking governance*, yang nantinya akan menghasilkan temuan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menganalisis kegiatan penelitian yang berfokus pada kegiatan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelenggarakan transparansi serta informasi kepada masyarakatnya, sehingga peneliti memerlukan gambaran mengenai jenis penelitian yang nantinya akan digunakan untuk terjun langsung ke lapangan. Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu menganalisis keefektifan dan keberhasilan pemerintah dalam bekerjasama dengan media massa lokal dalam keterbukaan informasi publik, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) sebagaimana dikutip Djam'an Satori, didefinisikan sebagai:²³

“Proses inquiry (pemeriksaan) tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi pada suatu pengaturan yang alami, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”

Penjelasan mengenai penelitian kualitatif di atas, dirancang agar hasil penelitiannya memiliki kontribusi terhadap teori dan dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap kebijakan, masalah sosial, maupun kebijakan-kebijakan serta tindakan.²⁴ Jika dihubungkan dengan penelitian yang akan dibahas, tentunya penelitian kualitatif dapat sangat membantu, karena didasarkan pada analisis kata, gambar, hingga video, sesuai dengan fokus

²³ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012, Hlm.24

²⁴ *Ibid.*, Hlm.22

penelitian ini adalah membaca opini publik mengenai kinerja pemerintah dalam mempublikasikan *statement*, serta kriteria program yang digunakan. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi dari hasil pengumpulan data yang akurat.

Sebagaimana penelitian yang diagendakan, deskripsi tersebut digunakan oleh peneliti untuk membantu berjalannya proses penelitian deskriptif ini dari berbagai sumber data, diantaranya: wawancara yang mendalam dengan informan, melakukan observasi atau pengamatan partisipasi, kajian studi literatur, dan melakukan wawancara dengan informan. Dengan kriteria tersebut, diharapkan data-data yang digunakan dapat membantu berjalannya penelitian sesuai dengan prosedur-prosedur deskriptif.

3.2 Jenis Data

Pada tahap ini, jenis data yang disajikan sangat berkaitan erat sesuai dengan jenis penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena berhubungan langsung dengan sumber data tersebut diperoleh dan dimaksimalkan sebagai faktor yang membantu dalam proses penelitian. Pada fokus penelitian ini, ada 2 (dua) macam jenis data yang diperoleh peneliti untuk memberikan data diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. *Data Primer*: yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber tanpa ada perantara yang secara khusus, kemudian dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab kriteria fokus dari penelitian tersebut. Semisal observasi, maupun dengan wawancara.
2. *Data Sekunder*: yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung untuk mendukung penelitian ini. Misalnya, data-data, dokumen, arsip-arsip resmi, foto-foto publikasi berita, website, literatur, serta buku-buku yang ada di lokasi penelitian.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002, Hlm.107

Pertama, data primer digunakan oleh peneliti untuk membantu adanya data-data seperti observasi lapangan atau program serta wawancara langsung dengan para informan yang langsung terlibat dalam pengoprasian kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut. Data primer juga menjadi data yang paling utama di dalam membantu penulisan penelitian, dengan mendeskripsikan hasil-hasil dari beberapa pengamatan langsung di lapangan, hingga mewawancarai orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, baik itu dari pegawai Pemerintah Provinsi NTB, hingga wartawan yang mewakili media massa lokal.

Kedua, data sekunder digunakan oleh peneliti, untuk mengimbangi data primer seperti observasi dan wawancara langsung yang telah dijelaskan di atas, dengan menyelaraskan kedua aspek tersebut dengan data-data sekunder secara tidak langsung. Data tersebut dapat dicontohkan seperti arsip, bentuk berita publikasi yang ada pada website, majalah bulanan Provinsi NTB, koran, maupun dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Selain itu, dengan menggunakan 2 (dua) jenis data di atas, tentunya penelitian ini harus menggunakan buku-buku penunjang penelitian metodologi penelitian kualitatif, jurnal, hingga mempelajari penelitian-penelitian studi terdahulu, agar proses penelitian mendapatkan sisi positif tersendiri, hingga mengungkap beberapa aspek yang sebelumnya belum terjelaskan, dengan mengkombinasikan serta meminimalisir terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah fase pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara, seperti data primer dan data sekunder seperti yang telah dijelaskan.²⁶ Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, beberapa opsi untuk memecahkan masalah tersebut diantaranya melalui teknik observasi, wawancara, maupun studi literatur.

3.3.1 Observasi

Menurut Aan Komariah (2011), sebagaimana dikutip Djam'an Satori, metode observasi memiliki pengertian sebagai berikut:²⁷

“Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat dengan seluruh panca indera, sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu media visual/audio visual misalnya teleskop, handycam. Namun yang terakhir ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung pada natural setting bukan setting yang sudah direkayasa.”

Dari pemaparan metode observasi di atas, peneliti menggunakan metode tersebut, untuk memaksimalkan pemantauan terhadap jalannya kinerja atau proses pendistribusian publikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan pihak media massa lokal. Dalam hal ini, jenis observasi yang digunakan adalah jenis non partisipan, yang menjelaskan observasi yang tidak ikut

²⁶ Djam'an Satori., *Op.Cit.* Hlm.103

²⁷ Djam'an Satori., *Op.Cit.* Hlm.105

dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.²⁸

Observasi tersebut juga dimaksimalkan dengan adanya peneliti yang terjun langsung ke lapangan, untuk mengamati dan mempelajari proses penggunaan website, cara menjawab *sms center*, berapa jumlah sms yang masuk ke Setda Provinsi NTB, hingga jenis-jenis penggunaan media massa lokal yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan *informan*²⁹ lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode *interview*, subjek merupakan informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya yang secara ideal yang diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi *standart* (semi struktur), yang berarti menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, seperti garis-garis besar pokok-pokok pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannya, *interviewer*³⁰ mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan serta pemilihan kata-kata juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

²⁸ Suharsimi Arikunto., *Op.Cit.* Hlm.188

²⁹ Informan merupakan orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan objek penting dalam sebuah penelitian.

³⁰ *Interviewer* merupakan seorang yang memiliki kepentingan sebagai penanya informan, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan *interview* (wawancara).

Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah melanjutkan mengenai kinerja dari beberapa informan yang terlibat secara langsung dalam implementasi kegiatan *e-government*, hingga para pelaku media massa lokal tersebut. Di bawah ini merupakan penentuan informan yang diwawancarai oleh peneliti, demi memperoleh data yang valid dengan proses interaksi langsung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian dan Informasi yang Dibutuhkan

No.	Informan	Jabatan	Informasi
1.	I Gede Putu Ariyadi	Kepala Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian <i>sms center</i> dan website dalam menjawab opini masyarakat NTB yang ditujukan kepada instansi terkait. • Kelebihan dan hambatan dalam program <i>sms center</i> dan website.
2.	Turmudzi	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian berita dalam website serta fitur-fitur dari website. • Membangun relasi dengan media massa lokal NTB melalui forum wartawan pemprov.
3.	Kusuma Wijaya	Wakil Koordinator Pejabat Dokumentasi dan Arsip PPID NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan keefektifan website dan <i>sms center</i> dalam SKPD di Provinsi NTB. • Relasi antara PPID dengan Setda Provinsi NTB dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
4.	Yasrul	Anggota Bagian Santel dan LPSE Setda Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian kegiatan <i>sms center</i>, website dan <i>e-procurement</i> serta cara mengkonfirmasi program <i>e-government</i> kepada masyarakat. • Kinerja program <i>e-government</i> dalam pengaplikasiannya sejak diluncurkan 2009 lalu.
5.	Alfian Yusni	Pimpinan Redaksi Lombok Post	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin relasi dari segi media cetak dengan instansi Setda Provinsi NTB. • Proses penulisan berita dan pengumpulan data mengenai isi berita media cetak.
6.	Kusmayadi	Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB/ Wartawan Lombok Post	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin relasi dari forum wartawan pemprov dengan instansi Setda Provinsi NTB. • Sejarah berdirinya forum wartawan pemprov, dan kinerjanya bagi relasi media dengan pemerintah, maupun antar media massa lainnya.
7.	Zul Fahmi	Wartawan Lapangan <i>Lombokita.com</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin relasi dari segi media <i>online</i> dengan instansi Setda Provinsi NTB. • Program publikasi pembaharuan berita <i>online</i>.

No.	Informan	Jabatan	Informasi
8.	Khotibul Islam	Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan UU mengenai keterbukaan informasi publik dalam segi pengimplementasiannya di Provinsi NTB. • Kelemahan dari implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.
9.	Masyarakat	Pengguna layanan <i>sms center</i> dan website ³¹	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan terhadap program <i>sms center</i> dan website Provinsi NTB. • Saran mengenai kekurangan dalam program tersebut, mewakili masyarakat secara umum.

(Hasil Wawancara Terlampir)

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Dari ke 9 (sembilan) penentuan informan di atas, peneliti bisa mewawancarainya sesuai dengan kinerja serta posisi informan terhadap penggalan data-data penelitian yang valid, untuk dideskripsikan ke dalam bentuk penelitian skripsi. Peneliti juga menjadikan informan di atas, sebagai jalan masuk untuk merefleksikan data-data dari hasil wawancara tersebut ke dalam konsep *networking governance* serta teori *reinventing governance* yang telah nantinya akan berlangsung di Provinsi NTB.

Untuk ke depannya, kegiatan *interview* tersebut diharapkan dapat membantu menganalisis keefektifan penggunaan sarana *e-government* yang direlaskan dengan pihak media massa lokal, mengenai hambatan, serta keberhasilan implementasi program tersebut dalam lingkup Provinsi NTB.

3.3.3 Dokumentasi dan Studi Literatur

Studi literatur merupakan data mengenai hal-hal atau beberapa variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulasi rapat, legenda, dan sebagainya.³² Secara spesifik, studi literatur sama dengan studi

³¹ Dalam tabel penentuan informan, pengguna website dan *sms center* dikosongkan, karena peneliti harus mencari data mengenai pengguna website dan *sms center* tersebut ke Bagian Kesekretariatan dan PDE sebagai bagian yang bertanggung jawab memuat data-data mengenai *sms* yang masuk ke Setda Provinsi NTB.

³² Suharsimi Arikunto., *Op.Cit.*, Hlm.206

pustaka maupun dokumentasi, karena dalam studi literatur terdapat pengambilan data untuk keperluan penelitian ke dalam jenis-jenis data, yaitu dokumen resmi, studi literatur, hingga arsip fotografi.

Studi literatur dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen (literatur) yang terdapat.³³

Dalam penelitian ini nantinya, akan digunakan metode analisis data menggunakan studi literatur, dokumen-dokumen, arsip, data-data dari pengguna *sms center* dan website dengan dibantu dengan observasi secara langsung terjun ke lapangan hingga wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Serta kegiatan-kegiatan langsung maupun tambahan yang mendukung adanya proses penelitian, seperti melihat langsung cara kerja dari beberapa program media serta penjelasan mengenai kelemahan dan kelebihan dari penggunaan programnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Dari beberapa penjelasan mengenai metode pengumpulan data tersebut, peneliti kemudian mengarahkan kepada teknik analisis data. Mengutip pendapat Bogdan & Biklen (2012) sebagaimana dikutip oleh Djam'an Satori, teknik analisis data memiliki definisi sebagai:

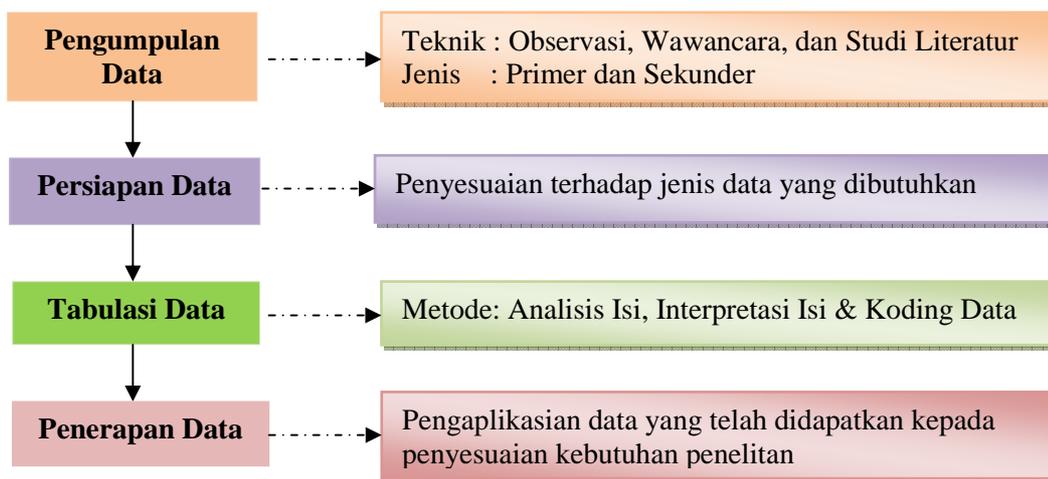
³³ Djam'an Satori., *Op.Cit.* Hlm.148

“Upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”³⁴

Kutipan mengenai teknik analisis data tersebut, menggambarkan bagaimana jalan dari penelitian yang berjenis kualitatif ini, menjadi penelitian yang akan berjalan lurus, dipahami oleh pembaca, serta nantinya mengemukakan hasil dari analisis data-data yang diperoleh untuk membantu mendeskripsikannya menjadi sebuah penelitian yang ideal.

Dalam hal ini, akan dikemukakan secara garis besar 4 (empat) proses mengenai analisis data yang digunakan dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dalam menganalisa keberlangsungan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Bagan teknik analisis data, yang digunakan dapat dicermati pada gambar 3.1 dibawah ini sebagai berikut.

Bagan 3.1 Bagan Teknik Analisis Data



Sumber: Suharsimi Arikunto (2002)

³⁴ *Ibid.*, Hlm.201

Tahap *Pertama* yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data seperti yang dijelaskan di atas, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur juga menjadi proses awal, kemudian mempersiapkan data. Artinya, persiapan data tersebut berarti masuk ke dalam tahap pemeriksaan kelengkapan data. Dari hal tersebut, peneliti otomatis akan memahami data-data yang sudah dimiliki, maupun dibutuhkan untuk melengkapinya saat berada di lapangan.

Kedua, yaitu tahap persiapan data. Proses persiapan data pada dasarnya sudah termasuk ke dalam tahap pengumpulan data. Namun, dalam pengumpulan data, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya tentunya harus dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Kesesuaian terhadap jenis data yang telah ada disesuaikan dengan penelitian lanjutan. Persiapan data ini juga memaparkan kepada pemisahan data-data yang telah ada, dan dimanfaatkan untuk membantu mempermudah penelitian lanjutan, serta berfungsi membaca kekurangan dari data yang dibutuhkan.

Ketiga, yaitu proses tabulasi data. Tabulasi data yang dimaksud untuk membaca penelitian mengenai keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana data yang telah diperoleh ditempatkan dalam bentuk tabel, dengan cara membuat tabel yang berisikan data-data yang dibutuhkan, sesuai dengan proses analisis data. Tabulasi data yang digunakan meliputi: data yang dibutuhkan, teknik memperoleh data, sumber data, dan metode analisis data. Dalam menganalisis faktor-faktor pendukung berjalannya kegiatan keterbukaan informasi publik di NTB, tentunya ada beberapa data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabulasi Metode Analisis Data

No.	Data yang dibutuhkan	Teknik Data	Sumber Data	Metode Analisis Data
1.	Menjalin komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat NTB <ul style="list-style-type: none"> • Program yang digunakan • Data pengguna dan hasil program <i>e-government</i> 	Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penerbitan berita website³⁵ • Bulletin <i>NTB Bersaing</i> 2013 • Laporan <i>e-government</i> Setda Provinsi NTB 2013 	<i>Koding Data dan Interpretasi Isi</i>
		Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Kesekretariatan & PDE Setda Provinsi NTB • Kepala Sub Bagian Santel & LPSE Setda Provinsi NTB 	
2.	Relasi antara pihak pemerintah dengan media massa lokal	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda NTB • Wartawan <i>Lombokita.com</i> dan <i>Lombok Post</i> 	<i>Interpretasi Isi</i>
3.	Analisa kegiatan pembuatan berita/publikasi informasi <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi NTB • Media <i>online</i> • Media cetak 	Studi Literatur dan Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berita website Provinsi NTB • Koran harian <i>Lombok Post</i> • Berita <i>Lombokita.com</i> 	<i>Analisis Isi dan Interpretasi Isi</i>
		Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Pemberitaan & Komunikasi Setda NTB 	
4.	Permasalahan mengenai isi <i>sms center</i> dan jumlah pengguna	Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan <i>e-government</i> Setda Provinsi NTB 2013 • Data dan arsip Bagian Kesekretariatan & PDE Setda Provinsi NTB 	<i>Koding Data dan Interpretasi Isi</i>
		Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Kesekretariatan & PDE Setda Provinsi NTB 	
5.	Proses pengaplikasian teori dan konsep mengenai efektifitas dan relasi	Studi Literatur	<p>Buku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • David Osborne, <i>Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government</i>, Jakarta: Perwajahan Lembaga PPM, 2005 • Hetifah J. Sumarto, <i>Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance</i>, 2003 <p>Jurnal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asep Arifin, <i>Pengaruh Reinventing Government dan E-governmnet terhadap Good Governance</i>, 2011 • Dedy Hermawan, <i>Trust and Network Governance: yang Transparan dan Akuntabel</i>, 2008 	<i>Analisis Isi</i>

³⁵ SOP merupakan *Standart Operating Procedure* yang dimaksudkan sebagai standart pelayanan prosedur yang harus ditepati oleh para anggota Bagian Humas dan Protokol maupun bagian lainnya dalam pembuatan berita website Setda Provinsi NTB

No.	Data yang dibutuhkan	Teknik Data	Sumber Data	Metode Analisis Data
6.	Menelaah efektifitas keterbukaan informasi publik di NTB <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • PPID • Forum Wartawan Pemprov NTB • Akademisi Hukum 	Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik 	<i>Koding Data dan Interpretasi Isi</i>
		Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna <i>sms center</i> dan website • Wakil Koordinator Kasi Kelembagaan Komunikasi PPID Dishubkominfo Provinsi NTB • Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB • Dosen/Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram 	
7.	Profil dan proses koordinasi media massa lokal dengan Pemerintah Provinsi NTB	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Redaksi Lombok Post • Bagian Manajemen <i>Lombokita.com</i> 	<i>Interpretasi Isi dan Koding Data</i>
		Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.32 Tahun 2002 mengenai lembaga penyiaran publik 	

Sumber : Data Primer di Olah (2014)

Dari pernyataan metode analisis data di atas, terdapat 3 (tiga) metode, yang disesuaikan dengan teknik memperoleh data, seperti studi literatur (pustaka), wawancara, dan observasi. Metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:³⁶

- a. *Analisis Isi*, yaitu uraian dan kupasan terhadap isi dari berbagai bentuk data di dalam literatur, transkrip, buku-buku, jurnal, maupun yang berbentuk kepustakaan. Analisa isi ini tidak jauh berbeda dengan analisa untuk menyurvei penggunaan kuisioner untuk meminta pendapat orang.
- b. *Interpretasi Isi*, yaitu penafsiran maupun prakiraan terhadap isi dari kegiatan wawancara/interaksi antar dua orang maupun lebih. Interpretasi juga pandangan tafsiran terhadap isi dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh *interviewer* kepada informan.
- c. *Koding Data*, yaitu pemisahan khusus terhadap analisis data-data yang berbentuk peraturan maupun perundang-undangan .

Keempat, yaitu proses penerapan data. Dalam proses ini, data-data yang telah ada sebelumnya akan dideskripsikan dengan data-data baru yang nantinya akan diperoleh peneliti dalam penelitian di lapangan, kemudian diterapkan dalam membaca permasalahan, analisis, serta mendreskripsikan data-data yang diperoleh

³⁶ Djam'an Satori., *Op.Cit.* Hlm.201

sesuai dengan apa yang didapatkan dari proses penelitian tersebut. Jika dikaitkan dengan metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, tentunya proses penerapan data sesuai dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya: observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan dan dianalisis secara kualitatif.³⁷

3.5 Lokasi Penelitian

Fokus penelitian yang ditujukan kepada aspek pemerintah Provinsi NTB, dengan lokasi penelitian yang ditentukan adalah Sekretariat Daerah Provinsi NTB, khususnya pada Bagian Kesekretariatan dan PDE. Selain itu, untuk menambah referensi data, penelitian juga dilaksanakan di kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishubkominformasi Provinsi NTB.

Penelitian juga dilaksanakan pada perkumpulan forum wartawan Pemprov NTB yang berlangsung pada Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, kantor redaksi media terkait (Gedung Graha Pena Lombok Post, kantor cabang *Lombokita.com* Mataram) serta Fakultas Hukum Universitas Mataram, untuk mewawancarai para informan yang membantu sistematisasi dari metode penelitian yang sedang berlangsung.

³⁷ Djam'an Satori., *Op.Cit.* Hlm.204

3.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian **Peran *Electronic Government* dan Relasi Media Massa Lokal dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi NTB, dengan Media Massa Lombok Post dan *Lombokita.com*)** ini, peneliti akan menjelaskan secara singkat *outline* yang terdiri dari 6 (enam) bab, yang diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini, dijelaskan bagaimana relasi antara pemerintah dengan media massa lokal dapat terjalin secara maksimal. Unsur keterbukaan informasi publik dan urgensi terhadap pelaksanaannya juga dijelaskan dengan mengambil studi kasus di Pemerintah Provinsi NTB. Program-program yang ditawarkan pemerintah seperti *sms center*, *website*, *e-procurement* dan relasi media massa lokal di NTB, juga menjadi landasan utama pada bab ini. Selain itu, dijelaskan pula rumusan masalah, manfaat, dan tujuan dari penelitian tersebut, untuk mempermudah berjalannya tahapan pada kegiatan penelitian dan terjun ke lapangan.

BAB II : KERANGKA TEORITIK. Dalam bab ini, beberapa elemen penting seperti studi terdahulu, dan aplikasi teori menjadi pokok utama pembahasan. Studi terdahulu menjelaskan beberapa penelitian, maupun jurnal yang menjelaskan mengenai keterbukaan informasi publik, *e-government* dan media massa sebagai pembanding penelitian. Selain itu terdapat teori dan konsep untuk membantu menganalisis penelitian ini yaitu teori *reinventing government* (David Osborne) dan konsep *networking governance* (Wayne R. Leach) dilengkapi bagan kerangka pikir penelitian, akan memudahkan jalannya sistematika penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN. Pada bab ini, berisi penjelasan mengenai jenis penelitian kualitatif, dengan kombinasi antara data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah pendeskripsian penelitian adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi literatur. Disisi lain, bab ini juga menjelaskan mengenai teknik analisis data, seperti pengumpulan data dengan persiapan data-data yang sudah ada, tabulasi data untuk membedakan data-data yang diperlukan pada saat berada di lapangan, dan penerapan data untuk menganalisis keefektifan berjalannya keterbukaan informasi publik dan relasi antar pemerintah dan media massa, hingga antar ke-2 (dua) media massa lokal tersebut di Provinsi NTB.

BAB IV : MENJALIN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN MEDIA MASSA LOKAL. Bab ini menjelaskan beberapa profil dari berbagai penggunaan program-program dari *e-government* dan media massa lokal di Provinsi NTB yang digunakan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Profil tersebut berupa beberapa proses kerja program, fitur yang ditawarkan oleh media massa, hingga analisis peneliti mengenai kelemahan atau kekurangan dari kinerja media massa dalam membantu pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi publik. Contohnya: Penggunaan *sms center*. Siapa yang bertanggung jawab membalas? Serta bagaimana analisis penerapan program *sms center* tersebut dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.

BAB V : RELASI DAN PENCAPAIAN EFEKTIFITAS PENGUNAAN PROGRAM *E-GOVERNMENT* DENGAN MEDIA MASSA

LOKAL. Pada bab ini dijelaskan mengenai jalinan relasi dan koordinasi antara *e-government* dari pemerintah dengan media massa lokal serta beberapa prosesnya. Selain itu, dijelaskan pula beberapa proses pencapaian efektifitas dan relasi yang terjalin dari penggunaan sarana *e-government* dan media massa tersebut dapat terlaksana di Provinsi NTB. Serta akan dipaparkan pula bagaimana mewujudkan keterbukaan informasi publik dari pengaplikasian teori dalam bentuk variabel serta paparan unsur transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas informasi maupun publikasi pada setiap sub bab yang menjadi topik pendukung dalam bab ini.

BAB VI : PENUTUP. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan mengenai capaian relasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan media massa lokal serta capaian efektifitas penggunaan program dalam analisis implementasi keterbukaan informasi publik dan rekomendasi dari keseluruhan pelaksanaan penelitian. Peneliti juga menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang disimpulkan ke dalam rumusan masalah, ataupun sekedar merekomendasikan dalam menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan tersebut serta memberikan beberapa masukan, usulan, saran maupun kritikan kepada masyarakat terkait dengan perbaikan beberapa implementasi dari pemerintah Provinsi NTB yang sejatinya telah berjalan untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).***

BAB IV

MENJALIN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN MEDIA MASSA LOKAL

Pada bab 4 (empat) ini, peneliti akan menjelaskan dan menghubungkan beberapa program *e-government* yang tentunya sudah dikelompokkan untuk dikaitkan dengan pengaplikasian tujuan utama yaitu keterbukaan informasi publik, serta beberapa media massa lokal di Provinsi NTB yang membantu tersebarnya informasi dan publikasi dari pemerintah kepada masyarakat umum. Menjalin komunikasi masyarakat juga dimaksudkan sebagai refleksi dari implementasi UU No.14 Tahun 2008 yang dianalisis mengenai beberapa cara yang berbeda dari pemerintah dengan media massa, tetapi tidak menghilangkan segi penggunaan sarana, melainkan beberapa aspek komunikasi yang sama.

Bab ini juga mengemukakan proses dari 2 (dua) media massa lokal di NTB, dan proses kerjasama untuk mengembangkan dan menghimpun informasi, menindaklanjuti proses publikasi, hingga mengikuti *SOP* dari Pemerintah Provinsi NTB untuk menjalin relasi dalam memudahkan kegiatan penyebarluasan berita dan informasi melalui *e-government*.

4.1 Program *E-Government* Sekretariat Daerah Provinsi NTB

E-government merupakan program khusus yang dikelola oleh lembaga pemerintah untuk memberikan informasi berbasis teknologi inovatif, yang terhubung kepada aplikasi internet dan jaringan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan masyarakatnya, mejalin relasi dengan pihak swasta, pelayanan publik, maupun pihak-pihak lain di luar pemerintah serta antar pemerintah. Hal senada dikemukakan oleh Richardus (2006) mengenai *e-government*, yakni:

“E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, public service, and other arms government. And electronic governments is about bringing the government into the world of the internet, and work in internet time ”³⁸

Pelaksanaan *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada dasarnya merupakan aspek utama mengapa peneliti mengambil tema mengenai keterbukaan informasi publik yang memfasilitasi aspek demokrasi di Indonesia. Di Provinsi NTB, pengaplikasian program ini sudah terselenggara, namun masih dalam tahap penyesuaian dan percobaan. Beberapa program *e-government* dapat dicontohkan seperti penggunaan website, *sms center*, *e-procurement*, *e-commerce*, dan sebagainya.³⁹

4.1.1 Profil *Sms Center* Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Program pertama dalam pemamparan *e-government* pada penelitian ini adalah *sms center*. Pada dasarnya, *sms center* merupakan program berbasis komunikasi 2 (dua) arah, dengan menggunakan perantara telepon seluler yang berbasis *short messages* (pesan pendek)⁴⁰ yang dikemukakan masyarakat kepada Gubernur, beberapa SKPD, dalam bentuk undangan.⁴¹ Isi *sms center* sendiri adalah beberapa penyaluran aspirasi dalam pelayanan publik, baik berupa informasi, saran, kritikan, maupun pertanyaan, atau pengaduan dari masyarakat. Sms tersebut tentunya akan dibalas, melalui media cetak setiap hari Senin, dan

³⁸ Richardus Eko., *Op.Cit.* Hlm.3

³⁹ Peneliti memilih 3 (tiga) program *e-government* tersebut dikarenakan: *Pertama*, akses yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat di NTB. *Kedua*, karena aspek komunikasi yang didasarkan pada unsur keterbukaan informasi publik di NTB, *Ketiga*, adalah kedua program tersebut tergolong baru dalam proses *e-government* Setda Provinsi NTB, pada Tahun 2009.

⁴⁰ Program *sms center* ini menggunakan *server sms gateway* dan aplikasi *PHP (Hypertext Preprocessor)*

⁴¹ *Sms center* antar SKPD dimaksudkan sebagai cara dari pemerintah Provinsi NTB untuk menyebarkan undangan antar SKPD lain dalam lingkup Provinsi NTB, seperti undangan rapat, pertemuan dengan Gubernur, Sekda, hingga undangan peringatan hari besar, libur nasional, upacara, dsb.

diutamakan untuk merespon pertanyaan/pengaduan yang menjadi perhatian publik secara umum, yang merupakan salah satu program komunikasi langsung antara masyarakat NTB dengan beberapa pemangku jabatan, maupun kepada Dinas atau SKPD terkait.⁴²

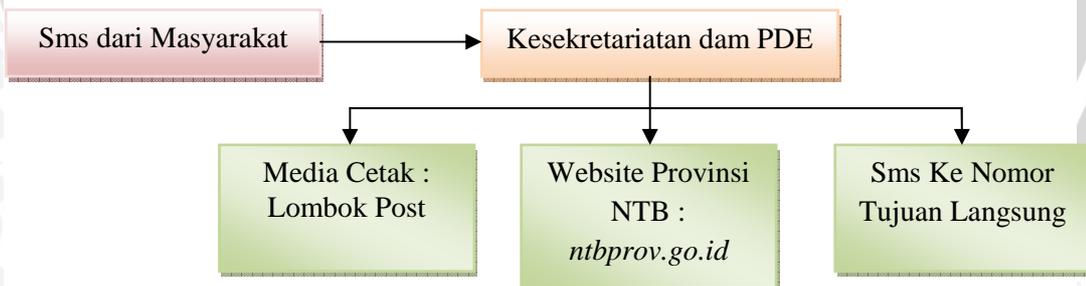
Gambar 4.1 Publikasi Informasi Penggunaan *Sms Center* dari Bulletin Bulanan Pemerintah Provinsi NTB



Sumber: Bulletin NTB BerSaing Edisi Mei 2013

Sms center yang digagas oleh Gubernur NTB, M. Zainul Majdi secara resmi diluncurkan pada Bulan Desember Tahun 2008, dan menjadi program *e-government* pertama yang digagas dalam jabatan periode pertama Gubernur NTB, bekerjasama dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB, Ada beberapa alur dalam implementasi *sms center*, sebagai berikut:

Bagan 4.1 Alur *Sms Center* Provinsi NTB



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Dari alur di atas, sms yang dikirimkan oleh masyarakat ke nomor 0811301300, akan langsung masuk ke Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Setda Provinsi NTB sebagai tim pengelola, kemudian di *forward*

⁴² Dikutip dari Bulletin NTB Bersaing: Beriman dan Berdaya Saing, Edisi III: Maret 2013

kepada setiap SKPD sesuai dengan isi sms yang masuk. Ada 3 (tiga) metode dalam membalas sms yang masuk, antara lain sebagai berikut:

- a. Melalui media cetak (Lombok Post): Diposting di halaman khusus oleh Setda Provinsi NTB kepada setiap sms yang masuk (dikhususkan pelayanan publik) setiap hari senin.
- b. Melalui website (*ntbprov.go.id*): Dengan membuka web tersebut, dan setiap balasan sms yang masuk akan diposting pada halaman lain.
- c. Melalui balasan sms langsung: Dengan pembalasan langsung dari nomor tersebut kepada nomor masyarakat yang mengakses *sms center* tersebut.

Analisis peneliti dalam proses terselenggaranya *sms center* ini dimaksudkan untuk memperbaiki kriteria dan proses dari program tersebut, untuk menimbulkan hubungan timbal balik pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Analisis peneliti pada program ini sebagai berikut:

Pertama adalah media ini diindikasikan untuk memperkuat peran M. Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) yang pada saat itu baru menduduki jabatan sebagai Gubernur NTB Periode 2009-2013, dalam proses pendekatan Gubernur kepada masyarakat. Akan tetapi dalam prosesnya, masyarakatlah yang mengirimkan sms kepada Gubernur, dan *sms center* tidak mengakses sms Pemberitahuan/Himbauan yang dikirimkan langsung kepada nomor masyarakat.⁴³

Kedua, proses konfirmasi sms dari *sms center* Pemerintah Provinsi NTB masih membingungkan beberapa pengguna, dikarenakan jenis-jenis konfirmasi yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan di atas, ada 3 (tiga) cara: (media Lombok Post, website, sms langsung ke nomor tujuan) tidak langsung kepada nomor tujuan serta efisiensi waktu konfirmasi balasan sms dari pengguna yang harus menunggu setiap hari Senin.

⁴³ Proses sms keluar dari program *sms center* tersebut juga hanya digunakan sebagai Sms Undangan ke berbagai SKPD lainnya dalam menelaah kehadiran rapat yang diselenggarakan Gubernur, maupun konfirmasi kehadiran undangan dari Setda NTB kepada pejabat SKPD.

4.1.2 Profil Website Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Program *e-government* kedua adalah website Provinsi NTB, yang dapat diakses melalui media internet. Website *ntbprov.go.id* ini secara resmi diluncurkan sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 62 Tahun 2009 mengenai penerapan *e-government* Provinsi NTB.⁴⁴

Secara garis besar, website yang dikelola langsung oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE yang bekerjasama dengan Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB sebagai pembuat berita website ini, juga memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat pengguna internet, untuk dapat mengetahui berita-berita terbaru, maupun acara-acara, ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh SKPD di Provinsi NTB.

Gambar 4.2 Website Provinsi NTB



Sumber: *ntbprov.go.id* (2014)

⁴⁴ Website Pemerintah Provinsi NTB merupakan website pertama yang dicetuskan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan dibawah pengawasan PPID Dishubkominfo Provinsi NTB, yang merupakan program inovasi dari Bagian Kesekretariatan dan PDE, dimana berita-berita dan informasi dapat diakses dengan mudah melalui *gadget*, dan informasi/berita di-*update* setiap hari.

Ada beberapa program/fitur yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mempermudah masyarakat mengetahui beberapa publikasi dari beberapa SKPD terkait sebagai berikut:

1. *Update Berita Terbaru*: Dimaksudkan sebagai *update* berita-berita mengenai kegiatan, maupun permasalahan yang mencakup bagian penting dalam lingkup Provinsi NTB yang dalam hal ini bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol, seperti bidang Pemerintahan, Perekonomian, Sosial, Budaya, Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikan, hingga Kesehatan.
2. *Jadwal Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur*: Bagi beberapa masyarakat yang ingin mengetahui, apa saja kegiatan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik internal maupun eksternal Provinsi NTB, dalam website ini tersedia fitur jadwal kegiatan Gubernur.
3. *Akses Sms Center*: Penggunaan dari *sms center* yang diakses oleh masyarakat kepada Gubernur maupun beberapa SKPD terkait tentunya akan mendapat jawaban/balasan langsung. Namun, tidak semua jawaban/balasan langsung ditujukan ke nomor yang bersangkutan melainkan website juga menyediakan fitur balasan sms-sms yang masuk ke Pemerintah Provinsi NTB.
4. *Pertanyaan Maupun Keluhan Melalui E-mail*: Fitur website ini juga menyediakan kolom untuk masyarakat pengguna Internet (khususnya pengguna Website) untuk melakukan penilaian terhadap kinerja SKPD, baik pertanyaan, keluhan, saran, kritik, hingga komentar kepada Gubernur.
5. *Posting Beberapa Website SKPD Lingkup Provinsi NTB*: Untuk mempermudah masyarakat pengguna internet, website ini juga memposting beberapa alamat website Dinas/SKPD lingkup Provinsi NTB.
6. *Download Dokumen Penting*: Dokumen penting disini merupakan akses bagi masyarakat untuk bisa mengunduh secara gratis beberapa majalah Pemerintah Provinsi NTB, seperti *PIJAR* (Sapi, Jagung, Rumput Laut), *NTB Bumi Sejuta Sapi*, *Gema Pembangunan NTB 2009*, *NTB Dalam Angka*, hingga jadwal-jadwal *event* yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB.
7. *Transparansi Penggalangan Dana IC (Islamic Center)*: Pembangunan Masjid Besar *Islamic Center* yang dicetuskan oleh Gubernur NTB menjadi hal yang terpusat saat ini. Transparansi ini dimaksudkan sebagai proses dari laporan keuangan yang masuk, maupun pengeluaran yang diposting langsung di website ini.

Dari beberapa pemaparan mengenai website tersebut, peneliti tentunya menilai dari kemudahan penggunaan, dan maraknya pengguna internet serta mudahnya jangkauan masyarakat kepada pemerintahnya. Website ini merupakan portal utama dari domain yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, sesuai ketentuan website milik SKPD menjadi sub domain dari domain utama.⁴⁵ Namun, ada beberapa fitur dalam website tersebut yang harus dikritisi kegunaannya, yaitu:

Pertama, fitur *sms center* yang ada di website tersebut merupakan proses pemborosan penggunaan domain oleh Pemerintah Provinsi NTB. Dikatakan demikian, karena sejatinya proses *sms center* memiliki program tersendiri, dan tentunya masyarakat mengharapkan proses *sms center* langsung dikonfirmasi melalui nomor pribadi masyarakat, tanpa harus membuka website.

Kedua, website ini seringkali dijadikan ajang *narsisme/pencitraan* dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pada saat pengguna membuka website tersebut, pengguna langsung dihadapkan kepada berita kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur melainkan tidak menyediakan berita seputar kegiatan di Provinsi NTB, atau berita-berita *urgent* mengenai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB.

Ketiga, keefektifan penggunaan website ini tidak bisa dijangkau, seperti beberapa website Pemerintah Provinsi lainnya di Indonesia yang menggunakan voting persentase di dalam fitur website bagi pengunjung, untuk memberikan penilaian yang menjadi motivasi pemerintah untuk melihat apakah website tersebut antusiasme masyarakat yang mengonsumsi berita melalui website.

⁴⁵ Laporan Pelaksanaan *e-government* Setda NTB 2013., *Op.Cit.* Hlm.5

4.1.3 E-Procurement Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Selain *sms center* dan website Provinsi NTB, program *e-government* yang menjadikan relasi antara pihak swasta dan pemerintah dapat terjalin adalah program *e-procurement*. Program *e-procurement* merupakan sistem pengadaan produk barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik (*online*), dengan tujuan lebih efisien serta efektif, ataupun mengurangi penggunaan tenaga kerjadalam prosesnya.⁴⁶

E-procurement Pemerintah Provinsi NTB secara resmi diluncurkan pada awal Tahun 2012, dan mengalami perkembangan hingga saat ini yang ditujukan kepada pihak swasta yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam program kerja dari Pemerintah Provinsi NTB, seperti *tender*⁴⁷ pembangunan rumah sakit, pengadaan bantuan pangan non beras, pengadaan drainase jalan, pengadaan formulir dan sampul pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan berbagai macam bentuk pengadaan lainnya.⁴⁸

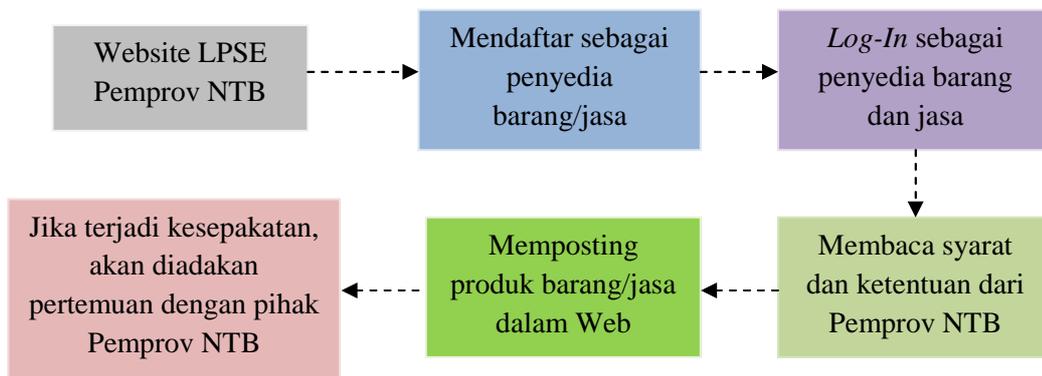
Berbeda dengan website Provinsi NTB yang memberikan informasi kepada masyarakat, *e-procurement* membantu pengembangan usaha masyarakat (swasta) serta membantu pemerintah dalam memberikan referensi dalam melaksanakan program kerja. Adapun proses *e-procurement* Pemerintah Provinsi NTB harus melaksanakan beberapa persyaratan sebagai berikut:

⁴⁶ Dikutip dari laman web: <http://lkpp.co.id/> pada Tanggal 09/05/2014 Pukul 22.46 WIB

⁴⁷ *Tender* dimaksudkan sebagai perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa yang memiliki kewenangan untuk mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah, dengan mengikuti syarat-syarat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah melalui persaingan antar perusahaan, yang tentunya nantinya dipilih sebagai pemenang dan melaksanakan arahan pemerintah.

⁴⁸ Dikutip dari laman web: lpse.ntbprov.go.id pada Tanggal 09/05/2014 Pukul 23.39 WIB

Bagan 4.2 Proses E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB



Sumber: Data di Olah (2014)

Jika dijelaskan secara rinci, bagan di atas mengarahkan bagaimana proses kesepakatan antara masyarakat (swasta) dengan pemerintah dapat terjalin, dengan metode melalui postingan website serta menginformasikan pihak swasta terlibat dalam pembangunan daerahnya.

Gambar 4.3 Website LPSE E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB

No	Kategori	Nama Lelang	Agency	Tahap	HPS	
1	Jasa A Pengum Katego Semua	Pengadaan Barang Jasa Konsultansi Badan Usaha Jasa Konsultansi Perorangan Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya	ULP NTB	Provinsi Pengumuman Download Kualifikasi	Prakualifikasi Dokumen	74,95 jt
2	Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran	PENGADAAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014	Komisi Umum NTB	Prov. Pengumuman Pascakualifikasi Pemberian Penjelasan Download Dokumen	Pengadaan	1,18 M
3	Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran	Pembangunan Konstruksi Jalan Boulevard RSUP NTB	ULP NTB	Provinsi Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen	Pengadaan	1,61 M
4	Pengumuman - Peserta	PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN RSJ PROVINSI NTB	ULP NTB	Provinsi Pengumuman Download Kualifikasi	Prakualifikasi Dokumen	174,99 jt
5	Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran	Paket IX Pembangunan Sumur Bor Eksplorasi Menjadi Produksi di Kabupaten Lombok Tengah	ULP NTB	Provinsi Download Pengadaan Pengumuman Pascakualifikasi	Dokumen	325,23 jt

Sumber: lpse.ntbprov.go.id

Kegiatan *e-procurement* dalam website tersebut berada dibawah pengawasan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)⁴⁹, serta dicantumkan beberapa situs link lain, untuk mempermudah dan menginformasikan masyarakat (swasta) untuk mengetahui secara lebih detail sistem *e-procurement* dapat berjalan, sebagai berikut:⁵⁰

1. *INAPROC*: Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia
2. *SIRUP*: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
3. *E-Catalogue*: Katalog Elektronik
4. *MONEL*: Monitoring dan Evaluasi *Online*
5. *SDP*: Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Program *e-procurement* jika dikaitkan dengan impementasi keterbukaan informasi publik tentunya mencakup implementasi pemerintah dengan swasta/G2B (*Government to bussines*). Dalam hal ini peneliti tentunya memberikan beberapa kristisi terhadap berjalannya *e-procurement* seperti:

Pertama, website ini masih memiliki kelemahan dalam proses transparansi lelang *tender*, artinya masyarakat luas, tidak bisa mengakses/ memantau berjalannya proses tersebut, kecuali sebagai peserta *tender*. *Kedua*, pihak swasta masih cenderung bingung dalam mengakses *e-procurement* ini, karena dalam website tersebut masih banyak fitur-fitur yang membingungkan pengguna. *Ketiga*, kendala pertemuan tidak langsung yang kurang maksimal, membuat para tender masih malas untuk mengakses kerjasama melalui website, dibandingkan bertemu langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB.

⁴⁹ LKPP merupakan lembaga pusat yang berfungsi sebagai pengawas LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dari setiap SKPD di Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Lembaga ini menyediakan *call center* untuk mengantisipasi beberapa kekeliruan atau kesalahpahaman dalam proses kerjasama Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta menyediakan postingan mengenai peraturan dalam bentuk SOP yang bisa di download untuk dipelajari sebelum bertransaksi.

⁵⁰ Dikutip dari laman [webhttp://lpse.ntbprov.go.id/](http://lpse.ntbprov.go.id/) pada Tanggal 09/05/2014 Pukul 23.50 WIB

4.2 Media Massa Lokal Provinsi NTB

Keterbukaan informasi publik di setiap daerah di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek yang membantu tersalurkannya informasi, publikasi, dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakatnya. Aspek tersebut, merupakan elemen penting yang mengarah kepada media massa dan membantu pemerintah dalam melancarkan kebijakannya. Sedangkan media massa lokal yang ada di Provinsi NTB, sama seperti halnya media massa lainnya, mampu mempengaruhi opini masyarakat sebagaimana pendapat Darmastuti (2012) dibawah:

“Media begitu memenuhi keseharian hidup kita, yang tanpa disadari akan kehadirannya dan juga pengaruh-pengaruhnya. Media memberi Informasi, menghibur, menyenangkan, kadang mengganggu kita dan sepatutnya media massa berporos kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang bukan hanya aktual dan faktual tetapi memiliki nilai tanggung jawab sosial.”⁵¹

Setelah meninjau dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB, ada beberapa jenis media massa lokal yang turun langsung membentuk perkumpulan forum wartawan pemprov, dan forum tersebut merupakan akses dari para pers/wartawan dari berbagai aliansi media massa lokal di Provinsi NTB untuk dipermudah mengakses berita maupun informasi langsung dari Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) melalui Bagian Humas dan Protokol.⁵² Beberapa media massa tersebut disimpulkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Rini Darmastuti., *Op.Cit.* Hlm.43

⁵² Peneliti memilih media cetak dan media *online* sebagai relasi dari perwujudan korelasinya dengan *e-government* untuk menyingkronkan kegiatan *sms center* dengan media cetak, serta website Provinsi NTB dengan media *online* nantinya. Media cetak dipilih karena mudahnya akses dari masyarakat untuk mengkonsumsi berita setiap harinya, sedangkan media *online* dipilih agar menyalurkan dan memudahkan akses dari masyarakat untuk mengkonsumsi informasi dari

Tabel 4.1. Jenis Media Massa Lokal di Provinsi NTB

Online	Cetak
<i>lombokita.com*</i>	<i>Lombok Post*</i>
<i>antaranews.com</i>	NTB Post
<i>lombokpos.co.id</i>	Radar Lombok
<i>ntbprov.go.id</i> ⁵⁴	Suara NTB
<i>lomboknews.com</i>	Koran Sindo
<i>lomboktoday.co.id</i>	Radar Mandalika
<i>mataramnews.com</i>	Radar Sumbawa
<i>sasak.org</i>	Radar Tambora

Ket: *: Media yang dipilih dalam relasi *e-government*

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Beberapa jenis media massa lokal di atas, memang memiliki keunggulan masing-masing dalam proses publikasi dan cara kinerja mereka. Namun peneliti memilih 2 (dua) macam media, baik dari media elektronik, cetak, hingga media *online* dalam membantu peran *e-government*.

Ke-2 (dua) media tersebut adalah *Lombokita.com* dan *Lombok Post* karena dilihat dari perspektif penggunaan, ketersediaan, cakupan, serta relasi terdekat antara Pemerintah Provinsi NTB melalui FWP. Sejauh ini, media massa lokal yang aktif bekerjasama dengan pihak Setda Provinsi NTB juga merupakan seperti yang telah tergambarkan di atas, dan memiliki posisi dan gaya yang berbeda dalam mempublikasikan Informasi. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai media massa lokal yang memiliki akses kerjasama/relasi antar pihak Pemerintah Provinsi NTB melalui FWP dan melalui akses program *e-government*.⁵⁵

gadget pribadi, serta tidak menghilangkan unsur kerjasama dari 2 (dua) media ini dengan korelasi implementasi dari *e-government* (*sms center* dan *website*) Setda Provinsi NTB.

⁵³ Data dan Arsip, Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB

⁵⁴ Website *ntbprov.go.id* tidak masuk dalam daftar media massa lokal NTB, namun penempatannya sudah termasuk dari pembahasan *e-government*.

⁵⁵ Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dengan media cetak *Lombok Post* dan media *online Lombokita.com* dimaksud untuk mempermudah proses *e-government* dari Setda Provinsi NTB dapat berjalan dengan mudah. Akses *e-government* yang terbatas dapat dibantu dengan program media massa lokal tersebut melalui publikasi-publikasinya kepada masyarakat yang sebelumnya program *e-government* tersebut juga belum diketahui oleh masyarakat.

4.2.1 *Lombokita.com*

Lombokita.com merupakan media massa lokal pertama di Provinsi NTB yang kemunculannya berupa media *online* (dengan menggunakan media internet) secara utuh, dan menyebarkan berita-berita mengenai Provinsi NTB dengan akses yang sudah terbilang cukup mudah untuk saat ini. *Lombokita.com* juga merupakan lembaga swasta yang bergerak di bidang *building*, dan dari segi media, *Lombokita.com* didirikan terhitung dari Tanggal 18 November 2013 yang lalu, serta dalam kurun waktu dekat ini akan mempromosikan majalah mingguan.⁵⁶

Lombokita.com yang bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB juga tentunya memiliki akses untuk mempermudah masyarakat yang mengunjungi laman website tersebut ke laman website Provinsi NTB yaitu dengan disediakan *space* pada bagian kanan untuk membuka langsung website Provinsi NTB. Peneliti juga memilih *Lombokita.com* sebagai media *online* karena media massa ini adalah media massa yang utuh dan memiliki penyebaran yang luas (jejaring sosial: *Twitter* dan *Facebook*) serta wartawannya juga sudah terdaftar sebagai anggotaFWP⁵⁷.

Selain itu, ada beberapa fitur-fitur yang diunggulkan oleh *Lombokita.com*. Beberapa berita-berita di luar kabar dari pulau Lombok juga terselenggara untuk dikonsumsi kepada masyarakat yang mengunjungi laman website tersebut. Diantaranya seperti prioritas utama, seperti fitur Ekonomi, Bisnis, Saintek, Peristiwa, Wisata Kuliner, Gaya Hidup, dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Zul Fahmi (Wartawan lapangan *Lombokita.com*) pada Tanggal 24/01/2014 Pukul 14.00 WITA

⁵⁷ Forum wartawan Pemprov bersifat non formal dan diluar dari keanggotaan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang merupakan persatuan dari beberapa wartawan dan pers di seluruh Indonesia.

⁵⁸ Dikutip dari laman web: <http://lombokita.com/> pada Tanggal 24/01/2014 Pukul 11.00 WITA

Gambar 4.4 Website *Lombokita.com*

Sumber: *lombokita.com*⁵⁹ (2014)

Namun ada beberapa program dari website tersebut, yang dirasa peneliti cukup baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, di Provinsi NTB.

Adapun program tersebut sebagai berikut:⁶⁰

1. *Pilkada dan Pemilu*: Program ini memberikan informasi mengenai kabar dari Pemilihan Umum Kepada Daerah, dan Pemilihan Umum di Kabupaten, dan Kota di Provinsi NTB. Selain itu, Program ini menjelaskan beberapa berita seputar Partai Politik, hingga Dewan Perwakilan Daerah.
2. *Kampus Kita*: Fitur ini menjelaskan mengenai beberapa kabar dari seputar pendidikan, kreatifitas dan kegiatan siswa/siswi, hingga mahasiswa/mahasisiwi di Provinsi NTB. Beberapa berita mengenai kondisi seputar sekolah dan perguruan tinggi di Provinsi NTB juga menjadi senjata dari program ini.

⁵⁹ Proses kinerja publikasi *Lombokita.com* tidak hanya dengan membuka laman website nya saja melainkan proses berita disalurkan dengan menggunakan perantara postingan media di jejaring sosial *Twitter* dan *Facebook*.

⁶⁰ Lihat <http://lombokita.com/>

3. *Khazanah*: Jika pulau Lombok terkenal dengan *Pulau Seribu Masjid*, fitur ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai liputan keagamaan, hingga kegiatan penunjang rohaniah seperti liputan haji setiap tahunnya, peringatan Maulid Nabi, hingga kegiatan Pondok Pesantren yang terkenal sangat luas penyebarannya di Pulau Lombok.
4. *Blog Warga*: Dalam fitur ini, masyarakat yang mengunjungi website *Lombokita.com* diberikan kesempatan untuk mempromosikan blog mereka, dengan ketentuan blog tersebut berupa informasi-informasi penting, menarik, hingga patut untuk dikonsumsi masyarakat secara umum. Pengunjung web hanya memposting di bagian fitur *Blog Warga* dengan mencantumkan *e-mail* serta Blog yang akan di publikasikan gratis.

Dalam membaca proses kerja dari media *online Lombokita.com* yang masih tergolong media yang baru di Provinsi NTB, peneliti memberikan beberapa analisis dalam penyelenggaraan program ini sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan wawancara peneliti dengan Bagian Manajemen *Lombokita.com*, media massa ini kepemilikannya secara utuh dan dipimpin oleh M. Zainul Majdi (Gubernur NTB). Dari hal tersebut, tentunya media massa ini cenderung menjadi *tren center pencitraan* Gubernur NTB demi menciptakan berita dan informasi yang cenderung baik (jauh dari kontra pemerintah).

Kedua, berbeda dengan website Provinsi NTB yang memiliki kolom komentar dan *e-mail* langsung yang disediakan masyarakat untuk mengkritisi berita yang diposting, dalam kenyataannya hal tersebut tidak disediakan oleh pihak *Lombokita.com*. Hal ini mengurangi campur tangan masyarakat yang hanya bisa mengkonsumsi berita dan informasi saja tanpa adanya *feedback* langsung.

Ketiga, mengenai proses perkembangan media massa ini yang tergolong masih sangat muda, masih ada beberapa perbaikan-perbaikan yang perlu dilaksanakan, seperti melakukan beberapa survey mengenai pembaca. Kekurangan terhadap proses keterlibatan masyarakat dalam media ini, hingga proses kepemilikan saham yang menjadikan media ini media yang tidak netral.

4.2.4 Lombok Post

Jika melihat dari kesuksesan Lombok Post dalam menjadi *langganan* masyarakat dalam pengetahuan mengenai informasi sehari-hari, beberapa anak perusahaan dari Lombok Post saat ini sudah mulai menguasai media massa lokal khususnya di Provinsi NTB, seperti Radar Lombok, Radar Sumbawa, Radar Tambora, Radar Mandalika, maupun Lombok Post FM sebagai media elektronik.

Keberadaan Lombok Post dibawah naungan Jawa Post Group, menjadikan media cetak ini sebagai mitra dari pemerintah Provinsi NTB secara langsung. Dapat dicontohkan dalam menyalurkan kegiatan *e-government sms center* Pemerintah Provinsi NTB, Lombok Post didaulat sebagai media yang menyalurkan jawaban langsung dari Gubernur NTB kepada para pengguna *sms center* di Provinsi NTB yang diposting langsung setiap hari senin di Koran Lombok Post, dalam bentuk Gubernur NTB Menjawab.

Gambar. 4.5 Koran Lombok Post Edisi 22 Februari 2014⁶¹



Sumber: Observasi Penelitian Lombok Post (2014)

⁶¹ Dikutip dari laman web: <http://lombokpos.co.id/> pada Tanggal 22 Februari 2014 Pukul 11.24 WITA

Menelisik isi dari harian Lombok Post, ada beberapa fitur seperti halnya beberapa media massa yang mengandalkan program mereka untuk menjadi ujung tombak berkembangnya media massa dan memiliki nama disebagian besar masyarakat. Beberapa fitur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fitur Lombok Post yang tergolong dalam Unsur Keterbukaan Informasi Publik

Fitur	Isi
Politika	Menjelaskan beberapa berita seputar politik di Provinsi NTB, baik Pemilu, Pilkada, KPU, Partai politik, hingga informasi dari Dewan Perwakilan Daerah.
Ekonomi dan Bisnis	Menjelaskan beberapa berita seputar ekonomi dan bisnis di NTB maupun skala nasional.
Opini	Beberapa postingan opini atau pendapat masyarakat, baik atas nama instansi, perguruan tinggi, hingga tingkat pendidikan menengah.
Metropolis	Beberapa berita utama yang <i>ter-update</i> (khususnya pemerintahan) dalam skala lokal atau dikhususkan mengenai berita Provinsi NTB.
NTB	Berita mengenai pemerintahan Provinsi NTB, khususnya beberapa SKPD maupun Dinas, hingga informasi pejabat-pejabat (seperti mutasi, dsb).
Hukum dan Kriminal	Informasi seputar permasalahan hukum dan kriminal, dan berita mengenai penahanan seputar Provinsi NTB.
Kota (Mataram, Bima, Praya) dsb	Informasi umum mengenai kabar dari Ibukota Kabupaten dan Kota di Provins NTB.
Pendidikan	Berita mengenai perkembangan pendidikan di Provinsi NTB, baik profil sekolah/perguruan tinggi maupun permasalahannya.

Sumber: Harian Lombok Post Edisi Rabu 22 Februari (2014)

Dalam surat kabar harian yang memiliki 26 halaman ini, Lombok Post juga tidak hanya tersedia dalam bentuk media cetak saja, tetapi dalam bentuk *online* dengan isi maupun bentuk yang sama seperti halnya berbentuk *hardcopy*. Koran ini juga dirasa cukup efektif oleh peneliti dalam membawa unsur keterbukaan informasi publik, karena berita yang disajikan merupakan berita secara umum, dengan adanya unsur komersil, agar media massa tersebut terlihat lebih merakyat, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti.

Dari proses penelitian yang dilakukan, terdapat pula beberapa proses kinerja dari Lombok Post dalam kegiatan keterbukaan informasi publik yang masih menjadi polemik sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan beberapa kepemilikan saham PT. Suara Nusa Media Pratama (Lombok Post) yang salah satunya dimiliki oleh Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Lombok Post di *setting* untuk tidak menyuguhkan beberapa berita atau informasi yang menyudutkan Setda Provinsi NTB. *Kedua*, terkait pula dengan keberadaan forum wartawan pemprov yang diketuai oleh salah satu wartawan dari Lombok Post, pihak media massa ini diuntungkan mengenai proses penyebaran dan informasi mentah dari Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB yang kemudian menjurus kepada proses pembuatan berita Lombok Post yang lebih efektif dari beberapa media cetak maupun media lainnya. *Ketiga*, mengenai beberapa fitur untuk menilai dan mengkritisi kinerja pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, media massa ini seharusnya memiliki fitur yang lebih jelas, baik dari segi proses dan maksud dari tujuan kritisi tersebut. ***

BAB V

RELASI DAN PENCAPAIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PROGRAM *E-GOVERNMENT* DENGAN MEDIA MASSA LOKAL

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penelitian yang berjudul *Peran Electronic Government dan Relasi Media Massa Lokal dalam Keterbukaan Informasi Publik* ini tentunya memiliki sebanyak 2 (dua) rumusan masalah utama untuk dipecahkan dan dibahas secara proporsional dengan bahasa akademis.

Pertama, mengenai relasi, hubungan, ataupun kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak beberapa media massa lokal di Provinsi NTB, baik berbentuk program-program yang dirancang, maupun perjanjian yang tidak secara langsung tertulis. *Kedua*, yaitu mengenai pencapaian efektifitas penggunaan program-program dari *e-government* yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang disandingkan dengan beberapa program-program maupun siaran unggulan yang disuguhkan oleh media massa lokal di Provinsi NTB melalui gaya serta ciri khas mereka tersendiri.

Pada bab 5 (lima) ini, akan dibahas secara tuntas mengenai rumusan masalah tersebut, terkait dengan beberapa implementasi program, hingga sejauh mana keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB untuk mencerminkan UU No.14 Tahun 2008 tersebut, dengan relasi yang dijalin antara media massa lokal di Provinsi NTB. Peneliti juga nantinya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam keterbukaan informasi publik.

5.1 Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi dan Informasi

Menurut Tamburaka (2012) media massa sangat sering dikaitkan dengan beberapa pendapat, yaitu diantaranya merupakan “*musuh dari pemerintah*”, karena kinerja dan tugas dari media massa sendiri merupakan alat kritisi dan kontrol dari kinerja pemerintah hingga penghimpun aspirasi dari masyarakat.⁶² Pers yang diposisikan sebagai orang yang mampu mempengaruhi dan mendoktrin pemikiran dari masyarakat untuk semakin kritis dalam mengawasi kebijakan, kinerja pemerintah serta sekedar tanggap terhadap kepemimpinan pemerintahnya.

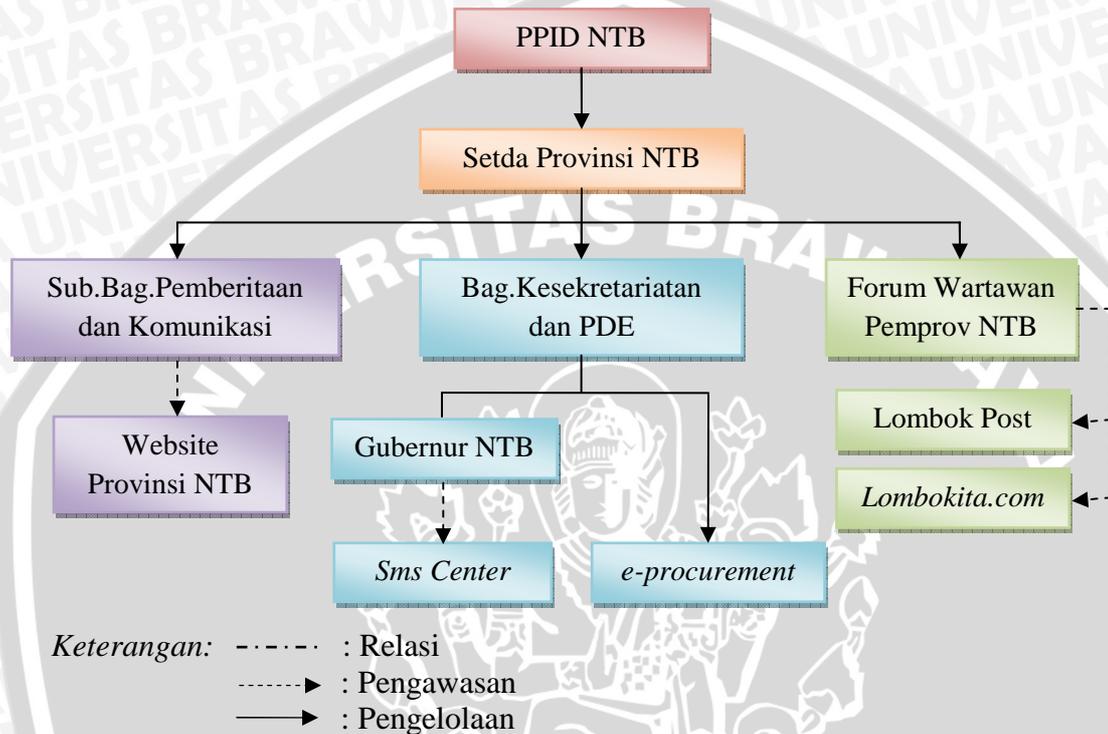
Namun, dalam hal yang telah dijelaskan di atas, media massa juga memiliki unsur positif mengenai hubungan atau relasinya dengan beberapa pemerintahan daerah, seperti mudahnya akses informasi dalam meninjau kinerja pemerintah. Hubungan tersebut dapat terjalin dikarenakan manfaat serta tujuan yang nantinya akan didapatkan baik dari pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam menyelenggarakan publikasi mengenai informasi, berita, hingga kebijakan dari pemerintah daerah melalui hubungan yang berlangsung.

Pemerintah juga melalui relasinya dengan media massa lokal memiliki kewajiban dalam mewujudkan hak-hak dari masyarakat dalam mengembangkan sistem informasi khususnya untuk mengelola kepentingan pelayanan publik. Tentunya, hal tersebut nantinya akan dapat membantu peneliti di dalam memberi jawaban mengenai relasi antara pemerintah dengan media massa lokal.

⁶² Apriadi Tamburaka., *Op.Cit*, Hlm.63

Berbicara mengenai keterbukaan informasi publik, di bawah ini merupakan bagan kerjasama yang terjalin antar beberapa SKPD di Provinsi NTB, dengan beberapa media massa lokal, sebagai berikut:⁶³

Bagan 5.1 Skema Pengawasan E-Government dan Media Massa Lokal NTB



Sumber : Data Primer di Olah (2014)

Seperti bagan yang telah dijelaskan di atas, peneliti menjelaskan secara detail bagaimana relasi yang terjalin antara beberapa SKPD di Provinsi NTB, hingga bagian yang mengelola *e-government* dan media massa lokal sebagai berikut:

- Dishubkominfo NTB melalui PPID merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya kinerja dari Setda Provinsi NTB khusus dalam kegiatan penyaluran sistem informasi publik, publikasi informasi pemerintah kepada masyarakat.
- Setda Provinsi NTB yang dalam hal ini merupakan lembaga di atas beberapa bagian yang menyelenggarakan *e-government* memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya program-program *e-*

⁶³ Badan Pengawasan disusun secara urut melalui lembaga tertinggi yang bertugas untuk mengawasi jalannya keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB, hingga lembaga yang menjalankan, dan mengelola unsur-unsur serta implementasi dari program keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

government secara langsung melalui beberapa bagian, yaitu Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Kesekretariatan dan PDE.

- c. Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi bertugas untuk memposting beberapa informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita-berita mengenai kegiatan Kepala Daerah, maupun Sekretariat Daerah, hingga SKPD Provinsi NTB, sedangkan Bagian Kesekretariatan dan PDE bertugas untuk menjawab beberapa pengakses *sms center* bekerjasama dengan Gubernur NTB langsung dalam proses penjawaban sms.
- d. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, forum wartawan pemprov juga memiliki ikatan langsung dengan Bagian Humas dan Protokol dalam mempermudah akses berita secara langsung. Beberapa wartawan/pers yang tergabung dalam forum tersebut bekerjasama dengan Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi untuk menjalin relasi agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi untuk beberapa media massa lokal.
- e. Media massa lokal yang diwakili oleh pihak forum wartawan pemprov tersebut, tentunya dengan sangat mudah untuk menjalin relasi nya dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB. Beberapa media yang terdaftar diantaranya Lombok Post, dan *Lombokita.com*.

Bagan 5.1 tersebut merupakan bentuk kerjasama dari beberapa SKPD dengan media massa lokal di Provinsi NTB, baik dalam segi pengawasan hingga implementasi langsung dari media massa kepada masyarakat melalui relasi antar pemerintah dan antar media massa lainnya. Dapat dijelaskan pula bahwa di dalam bagan tersebut terdapat SKPD Dishubkominfo Provinsi NTB atau PPID⁶⁴ yang berfungsi mengawasi berjalannya kegiatan sistem informasi publik yang di jalankan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui *e-government*.

Tentunya Pemerintah Provinsi NTB dalam menjalin relasi dengan pihak media massa lokal, memiliki sumbangsih mengenai cara, gaya, serta ciri khas yang berbeda di dalam menyelenggarakan unsur keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di Provinsi NTB.

⁶⁴ PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang di bawahi langsung oleh Dishubkominfo. PPID adalah lembaga pemerintah yang memiliki SOP, Pergub, dan SK Gubernur yang bertugas untuk mengawasi jalannya Sistem Informasi Publik (SIP) dan keterbukaan informasi publik di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

5.1.1 Proses dan Bentuk Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal

Mengenai bentuk dan proses kerjasama pemerintah dengan media massa lokal di Provinsi NTB, tentunya media massa lokal memiliki substansi dan cara yang sudah pasti berbeda dengan media massa lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kerjasama dan relasi yang dibentuk antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai media massa tersebut seperti yang telah dijelaskan pada sub bab di atas. Proses kerjasama meliputi beberapa program-program atau ikatan kerjasama yang menuju kepada implementasi informasi langsung antara pemerintah dengan media massa lokal melalui programnya.

Sedangkan bentuk kerjasama antar dua belah pihak membahas mengenai bagaimana bentuk relasi atau hubungan lembaga tersebut mengenai implementasi yang nantinya akan di lanjutkan ke dalam proses tersebut. Dalam menelaah proses dan bentuk kerjasama tersebut, peneliti membagi satu per satu media massa lokal, dengan membedakan beberapa bentuk kerjasama dengan proses kerjasama yang dijalin antara media massa dengan Pemerintah Provinsi NTB, sebagai berikut:

a. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama dalam hal ini menjelaskan seberapa jauh relasi yang terjalin antara media massa lokal tersebut dengan Pemerintah Provinsi NTB. Relasi tersebut juga tentunya menjadi tolak ukur proses kerjasama nantinya akan terjalin dalam berbagai bentuk, seperti program unggulan, dialog, maupun *space* dari pihak media massa untuk Pemerintah Provinsi NTB. Bentuk kerjasama tersebut, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Bentuk Relasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Media Lokal melalui Forum Wartawan Pemprov NTB⁶⁵

Media Massa	Bentuk Relasi	Forum Wartawan Pemprov NTB	
		Status	Intensitas Kunjungan ke Bag.Humas dan Protokol Setda NTB
Lombok Post	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai mitra dalam meneruskan informasi dari Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi NTB melalui media cetak. • Menjadi mitra Pemerintah Provinsi NTB disebabkan kepemilikan sebagian saham dari pihak Pemerintah Provinsi NTB kepada Lombok Post. 	<i>Terdaftar</i>	Memiliki satu orang pers untuk <i>stand-by</i> setiap hari dan melihat isu yang terdapat
Lombokita.com	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai mitra dan pers yang aktif dalam menjembatani beberapa peliputan informasi serta kegiatan dari Pemerintah Provinsi NTB melalui media <i>online</i>. • Sebagai <i>partner</i> dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, dikarenakan saham dari media ini murni dimiliki oleh Gubernur NTB. 	<i>Terdaftar</i>	Memiliki satu orang pers untuk wajib <i>stand-by</i> setiap harinya

Sumber : Wawancara dengan Informan (2014)

Tabel di atas menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak adalah *Pertama*, sebatas mitra yang meneruskan informasi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB kepada media yang bersangkutan dengan cara, dan proses mereka masing-masing. Lalu *kedua*, karena kepemilikan saham melalui Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB dan Assisten II Setda Provinsi NTB menjadikan media cetak ini sebagai media massa lokal yang dipercaya oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai *Market Share*.

⁶⁵ Wawancara dengan Kusmayadi (Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB) pada Tanggal 24/02/2014 Pukul 16.00 WITA dengan penjelasan mengenai forum wartawan pemprov dibentuk pada tahun 2009 yang merupakan perkumpulan anggota dari wartawan/pers dari media massa lokal di Provinsi NTB. FWP sendiri bukan lembaga resmi, namun hanya untuk mempermudah dan menjalin relasi antar wartawan maupun wartawan dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB. Forum ini juga menjembatani percepatan proses publikasi berita yang nantinya akan dipublikasikan melalui perantara pers tersebut kepada media mereka masing-masing, dengan perjanjian tidak langsung (sebatas tidak saling merugikan kedua belah pihak).

b. Proses Kerjasama

Setelah dijelaskan mengenai bentuk kerjasama di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai proses kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan media massa lokal terkait. Proses kerjasama tersebut meliputi penyesuaian terhadap objek-objek kesesuaian terhadap jenis dan cara dari masing-masing media massa tersebut. Proses kerjasama dirangkum sesuai dengan program media massa tersebut sebagai berikut:

- a. *Lombok Post: Pertama*, Proses kerjasama berbentuk disediakannya *space/kolom* untuk program *sms center* Gubernur NTB disebelah pojok kanan atas dari media cetak tersebut.⁶⁶ *Kedua*, dengan terbentuknya FWP, beberapa wartawan saling bertukar informasi/data mengenai beberapa berita terkait, misalnya: meminta foto acara terkait kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. *Ketiga*, beberapa media cetak terkait (termasuk Lombok Post) memberikan langganan koran kepada Pemerintah Provinsi NTB, melalui Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi.
- b. *Lombokita.com: Pertama*, proses kerjasama tersebut berbentuk disediakannya *space/kolom* untuk sub domain website resmi Provinsi NTB dalam website *Lombokita.com* tersebut disebelah kanan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pengunjung website *Lombokita.com* untuk senantiasa mengunjungi website Provinsi NTB.⁶⁷ *Kedua*, terkait dengan media cetak *Bulletin NTB BerSaing* yang setiap bulannya diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokol melalui Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi, *Lombokita.com* menjadi partner sebagai media massa yang menerbitkan dan mencetak bulletin tersebut setiap bulannya.⁶⁸

Proses dan bentuk diatas di buat oleh peneliti sesuai dengan wawancara yang terjalin dengan para informan, serta pemberian data yang diberikan oleh para informan sudah sesuai dengan porsi dari beberapa media massa, yang menjalin relasi dengan Pemerintah Provinsi NTB melalui Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi serta Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

⁶⁶ Muhtar Haboddin, *Gubernur NTB Menjawab*, Jogjakarta: IGI, 2012, Hlm.5

⁶⁷ Lihat <http://lombokita.com/>

⁶⁸ Wawancara dengan Agung (Bagian Manajemen *Lombokita.com*) pada Tanggal 24/01/2014 Pukul 14.00 WITA

5.1.2 *Sms Center* dalam Menjembatani Partisipasi Masyarakat Kepada Pemerintah

Program *e-government* pertama yang paling diunggulkan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah *sms center*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *sms center* memiliki peran serta andil yang penting di dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan menjembatani serta mengkritisi kegiatan-kegiatan pemerintah, baik dalam bentuk kinerja-kinerja SKPD, transparansi, informasi, hingga sebatas komentar mengenai proses kepemimpinan dari Gubernur NTB.

Sms center memang dicetuskan oleh Gubernur NTB terhitung sejak pada Bulan Desember 2008 yang lalu.⁶⁹ Namun, dalam implementasinya, tidak semulus apa yang telah diperhitungkan. Dalam pembahasan ini tentu akan dijelaskan, proses *sms center* tersebut dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, dengan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Gubernur NTB. Selain proses yang efisien, dengan mengirimkan sms (pesan pendek) dengan menggunakan telepon seluler pribadi kepada Gubernur NTB, *sms center* juga menjadi pilihan utama bagi semua kalangan usia masyarakat di Provinsi NTB.

Namun, di dalam isi dari proses tersebut, tentunya tidak semua masyarakat yang menikmati program ini, memiliki permasalahan atau kritikan yang sama. Peneliti tentunya membedakan jenis-jenis dari beberapa permasalahan/penyimpangan⁷⁰ dalam isi *sms center* sebagai berikut:⁷¹

⁶⁹ Data dan Arsip Bagian Kesekretariatan dan PDE, Setda Provinsi NTB

⁷⁰ Permasalahan/Penyimpangan dimaksudkan sebagai jenis-jenis kriteria dari isi sms yang ditujukan oleh masyarakat ataupun beberapa pegawai dari SKPD di Provinsi NTB yang mengakses *sms center*. Karena sebagian besar isi dari *sms center* ini merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai SKPD atau keluhan-keluhan negatif dari para masyarakat, maka penyimpangan tersebut dibagi menjadi beberapa *cluster*/kelompok, dan memiliki perbedaan masing-masing.

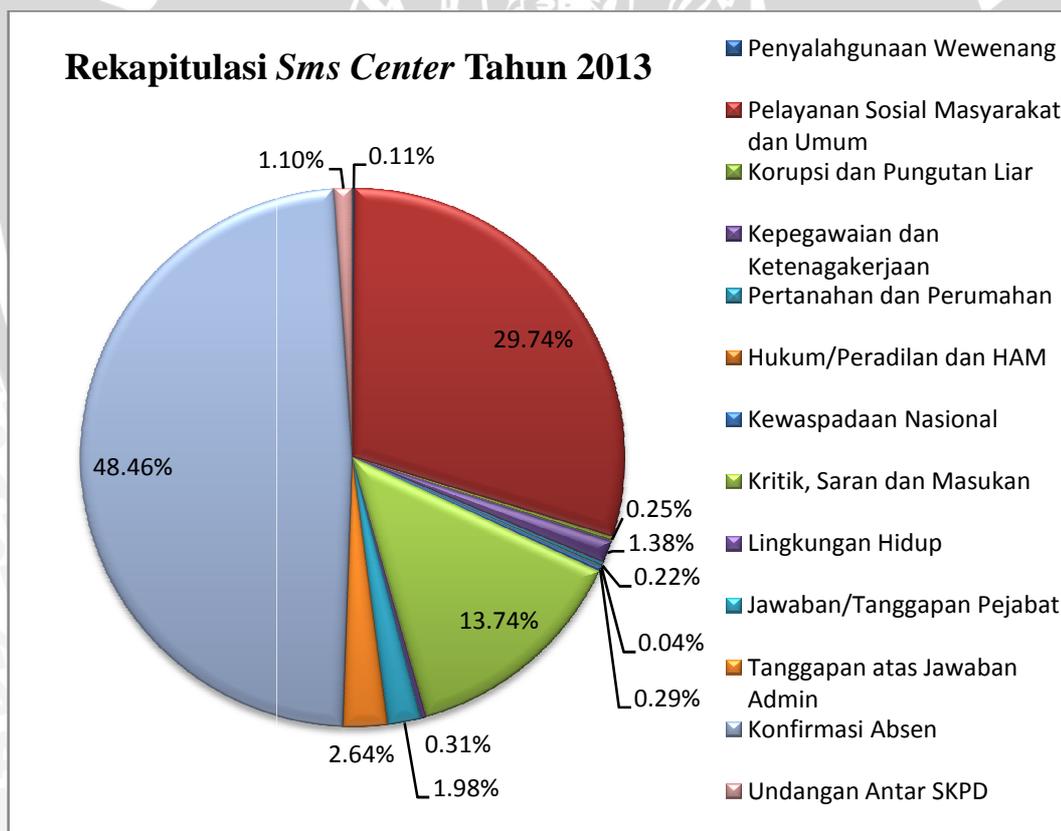
⁷¹ Laporan Pengaduan Masyarakat melalui *Sms Center* 2013, Bagian Kesekretariatan dan PDE.

Tabel 5.2 Kriteria Isi Sms Center Pemerintah Provinsi NTB

Kriteria Isi Sms	<i>Gubernur NTB, Bagian Kesekretariat dan PDE, SKPD/Dinas terkait</i>
Penyalahgunaan Wewenang	
Pelayanan Sosial Masyarakat dan Umum	
Korupsi dan Pungutan Liar	
Kepegawaian dan Ketenagakerjaan	
Pertanahan dan Perumahan	
Hukum/Peradilan dan HAM	
Tata Laksana dan Regulasi	
Kewaspadaan Nasional	
Lingkungan Hidup	
Kritik, Saran dan Masukan	
Jawaban/Tanggapan Pejabat	
Tanggapan atas Jawaban Admin	
Konfirmasi Absen ⁷²	
Undangan antar SKPD	

Sumber: Data dan Arsip Bagian Kesekretariat dan PDE (2014)

Grafik 5.1 Rekapitulasi Jumlah Kriteria Isi Sms Center Tahun 2013



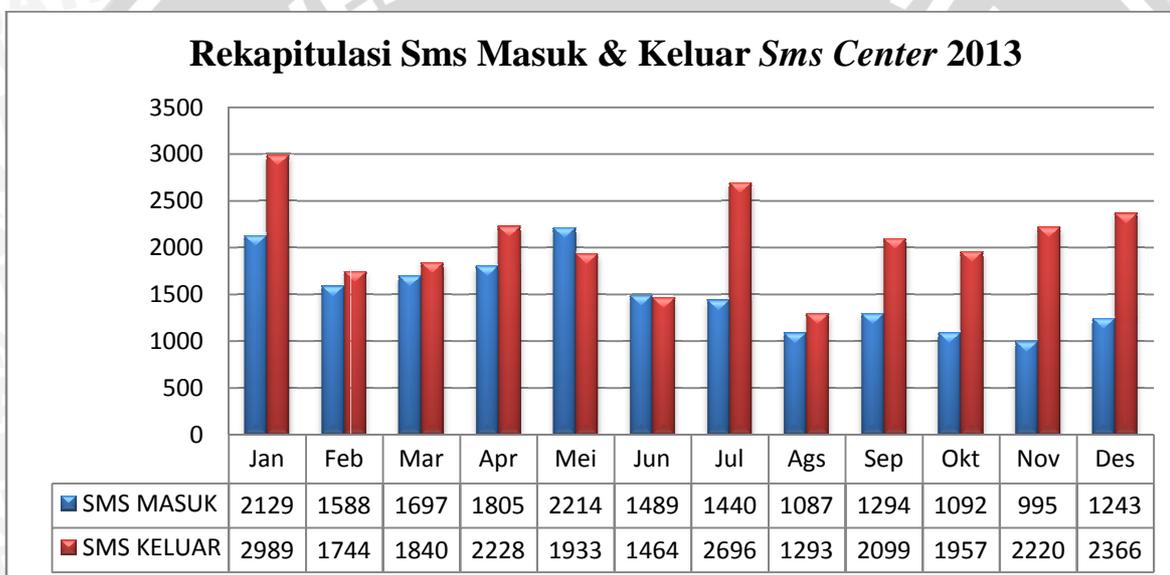
Sumber: Data dan Arsip Bagian Humas dan Protokol (2014)

⁷² Konfirmasi Absen dimaksudkan sebagai beberapa sms yang masuk dari beberapa pejabat SKPD/Dinas Provinsi NTB sebagai konfirmasi kehadiran (ketidakhadiran yang tidak melalui izin).

Data di atas menunjukkan beberapa sms yang menjadi prioritas adalah konfirmasi absen, pelayanan sosial masyarakat dan umum, dan kritik saran serta masukan dari para pengguna. Peneliti juga mewawancarai pendapat dari pengguna *sms center* sebagai berikut:⁷³

“...*Sms center* memang gampang digunakan, dan efisien, karena sudah bisa dijangkau dari handphone kita sendiri. Selain itu masyarakat bisa berkomunikasi langsung kepada pemerintahnya. Kekurangan yang perlu dibenahi mungkin balasan yang kita tunggu dari Pemprov memakan waktu yg sedikit lama, karena harus menunggu sampai hari senin atau sekitar satu minggu...” (0812572*****)

Grafik 5.2 Jumlah Rekapitulasi Sms Masuk dan Keluar Sms Center Tahun 2013

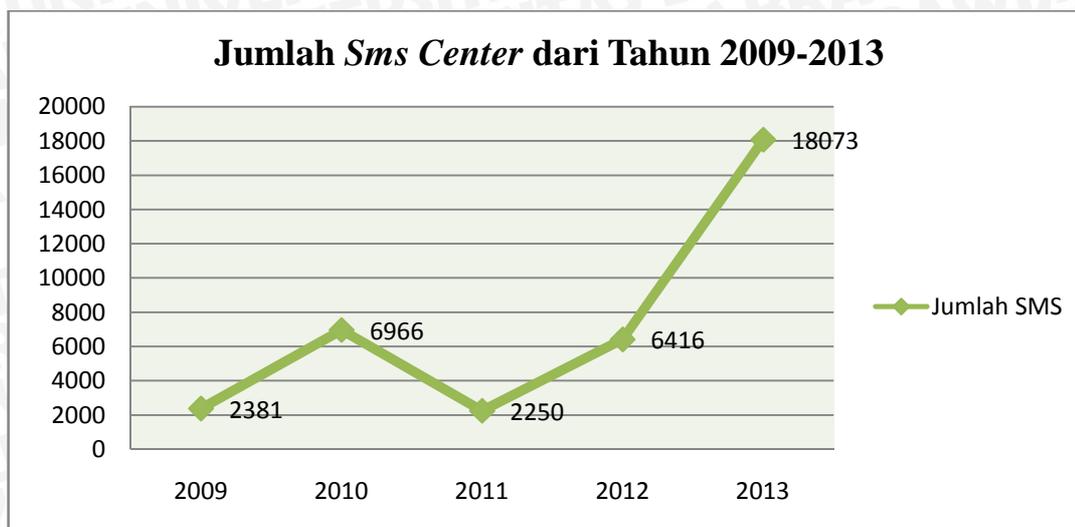


Sumber: Data dan Arsip Bagian Humas dan Protokol (2014)

Selain beberapa data mengenai *sms center* setiap bulannya di Tahun 2013, peneliti juga menyajikan data sms masuk dan sms keluar dari Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

⁷³ Informan dari wawancara tersebut berdasarkan nomor-nomor yang pernah mengakses *sms center* dan kemudian ditampung oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE. Nomor dari Informan tersebut juga dirahasiakan sesuai dengan *SOP sms center* dari Bagian Kesekretariatan dan PDE. Proses peneliti dalam melaksanakan wawancara dengan informan adalah menggunakan sms langsung kepada masyarakat pengguna, dengan mengirimkan pertanyaan mengenai kepuasan penggunaan program *sms center* dan beberapa kritik atas kekurangan yang ditujukan kepada pengelola *sms center*.

Grafik 5.3 Jumlah Sms Masuk dan Keluar Sms Center Tahun 2009-2013



Sumber: Data dan Arsip Bagian Kesekretariatan dan PDE (2014)

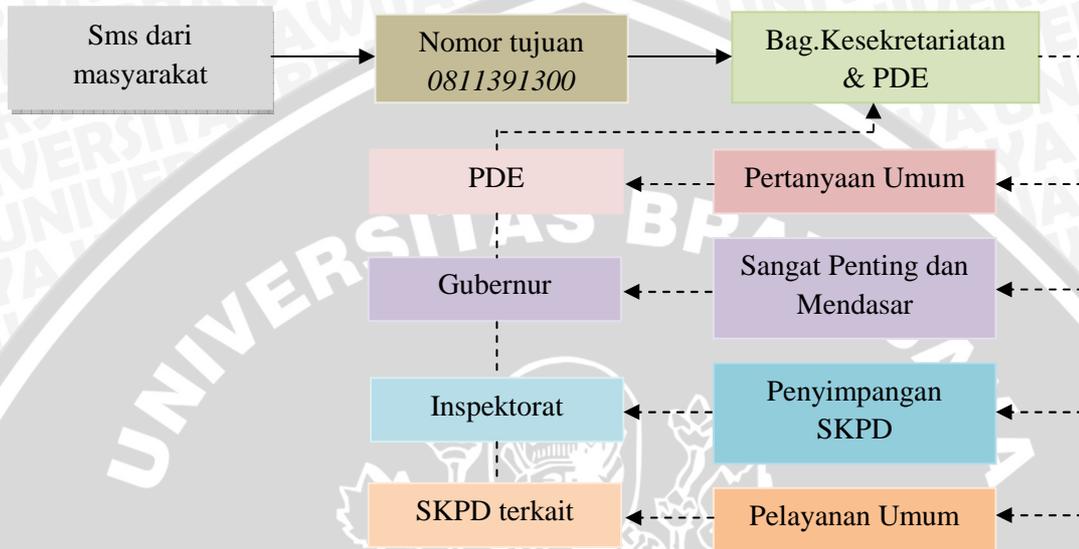
Data di atas juga menunjukkan total keseluruhan *sms center* baik sms masuk dari para masyarakat maupun sms keluar, yaitu sebanyak 18.073 selama Tahun 2013. Sms keluar terlihat lebih banyak dikarenakan kegunaan program tersebut juga diperuntukan dalam Konfirmasi Absen dan Undangan antar SKPD. Jumlah *sms center* setiap tahunnya terus meningkat dari saat peluncuran di Tahun 2009 (2.381 sms), 2010 (6.966 sms), 2011 (2.250 sms), dan 2012 (6.416 sms). Program ini terus meningkat seiring dengan mudahnya akses dan efisien waktu dalam penggunaannya.⁷⁴

Data tersebut menggambarkan intensitas kegunaan *sms center* yang pada awal berdirinya menjadi alat komunikasi antar masyarakat dan pemerintah, pada Tahun 2013 lalu memperlihatkan fakta yang negatif. Konfirmasi absen menunjukkan sms keluar lebih banyak dari sms yang masuk, hal ini dikarenakan beberapa pegawai SKPD yang tidak masuk kerja dapat dipantau dan terkontrol melalui *sms center*.

⁷⁴ Wawancara dengan Sena Puja (Kepala Sub Bagian Santel dan LPSE Setda Provinsi NTB) pada Tanggal 24/01/2014 Pukul 10.00 WITA

Adapun beberapa pengaduan penyimpangan di atas menjadikan pembagian alur dari jawaban/balasan dari pemerintah kepada masyarakat pengguna *sms center* dibedakan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:⁷⁵

Bagan 5.2 Proses Alur Sms Center



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Proses dari alur *sms center* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sms yang dikirimkan masyarakat, baik di dalamnya terdapat jenis/isi penyimpangan maupun laporan diarahkan dan ditujukan kepada nomor yang telah disediakan 0811391300.
- Sms yang telah masuk ke nomor tersebut, kemudian di tampung oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB sebagai admin (pengelola) dari *sms center* dan website Provinsi NTB.
- Bagian Kesekretariatan dan PDE membagi beberapa pertanyaan, komentar, kritik/saran (isi dari sms tersebut) kepada pihak terkait. Bagan di atas juga menunjukkan ada 4 (empat) instansi yang turun tangan langsung, yakni PDE mengurus pertanyaan umum, lalu Gubernur mengurus beberapa permasalahan yang sedang menjadi *trending topic*. Selanjutnya Inspektorat mengawasi sms yang berisi penyimpangan yang dilakukan SKPD di Provinsi NTB, dan terakhir SKPD mengurus kepentingannya masing-masing terutama dalam pelayanan publik.
- Dari beberapa Instansi tersebut tentunya memiliki sub domain yang tersambung langsung kepada Bagian PDE. Balasan tersebut tentunya

⁷⁵ Wawancara dengan I Gede Aryadi (Kepala Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB) pada Tanggal 23/01/2014 Pukul 10.00 WITA

dikembalikan kembali kepada pengelola *sms center* tersebut untuk dibalas kepada nomor pengguna *sms center* (masyarakat) dengan 3 (tiga) cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (balasan langsung, website Provinsi NTB, maupun media Lombok Post) untuk membantu berjalannya program tersebut.

Contoh isi dari *sms center* yang dikirimkan oleh masyarakat tersebut sebagai berikut:⁷⁶

Gambar 5.1 Isi Sms Center Gubernur NTB Menjawab



Sumber: *ntbprov.go.id* (2014)

Jika dikritisi secara lebih mendalam, dari beberapa data yang tersaji di atas, seperti hasil rekapitulasi sms masuk dan keluar pada Tahun 2013, serta beberapa jenis isi sms, peneliti menyimpulkan beberapa hal yang menjadi titik lemah dari berjalannya proses *sms center* tersebut sebagai berikut:

Pertama, Data mengenai rekapitulasi sms keluar pada Tahun 2013 di setiap bulannya berjalan stabil dan meningkat, hingga meninggalkan pertanyaan keefektifan sms masuk atau respon dari masyarakat yang dirasa cukup kurang. Sms mengenai konfirmasi absen yang sejatinya merupakan sms mengenai

⁷⁶ Gubernur NTB Menjawab, Dikutip dari laman web: <http://ntbprov.go.id/> pada Tanggal 24/02/2014 Pukul 17.00 WITA

kehadiran serta konfirmasi undangan rapat yang dikirimkan ke SKPD lainnya, menjadikan tanda bahwa *sms center* bukan lagi *jembatan* komunikasi antar masyarakat dan pemerintah, melainkan antar pemerintah saja.

Kedua, Rekapitulasi *sms* yang masuk pada Bulan Mei 2013, mengindikasikan bahwa pada bulan tersebut diadakan pemilihan umum kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi NTB yang menjadikan adanya peningkatan mengenai aspirasi masyarakat (baik aspirasi langsung terhadap penyelenggaraan pemilu yang kondusif, kepada kepala daerah, hingga penyelenggaraan pemilu yang diwarnai kecurangan) melalui kiriman laporan ke *sms center* dari masyarakat.

Ketiga, jika kita lihat mengenai data pengguna *sms center* dari tahun sejak diluncurkannya pada Tahun 2009 sebanyak 2.381 *sms* lalu di Tahun 2010 sebanyak 6.966 *sms* dan di Tahun 2011 turun menjadi 2.250 *sms*, maka akan menimbulkan tanda tanya dari pihak Pemerintah Provinsi NTB sendiri. Hal ini dapat dikritisi dan menimbulkan alasan bahwa intensitas pengguna *sms center* menurun, atau terdapat beberapa kejanggalan lain seperti: buruknya pelayanan *sms center*, rendahnya intensitas jawab dari pemerintah kepada masyarakat, hingga penggunaan *sms center* yang hanya digunakan antar SKPD saja.

5.1.3 Berita Online Sebagai Bentuk Transparansi Informasi Kepada Masyarakat

Kegiatan masyarakat pada era globalisasi ini tentunya tidak luput dari penggunaan sarana elektronik terutama akses internet. Akses tersebut memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini, peneliti akan membahas bagaimana proses dari pengguna internet tersebut bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan

transparansi mengenai akses informasi mengenai sejumlah berita, kebijakan, hingga publikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Website Provinsi NTB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sarana bagi para masyarakat untuk mengetahui dan mengupdate berita seputar informasi yang terbaru mengenai kegiatan-kegiatan dari Gubernur, Kepala Daerah, hingga beberapa SKPD lainnya di Provinsi NTB. Berita dan informasi tersebut di posting dan di-update setiap harinya oleh Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi serta Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB.

a. Website Provinsi NTB

Gambar 5.2 Berita Website Provinsi NTB “Core Even Bau Nyale”



Sumber: ntbprov.go.id (2014)

b. Website PPID Provinsi NTB

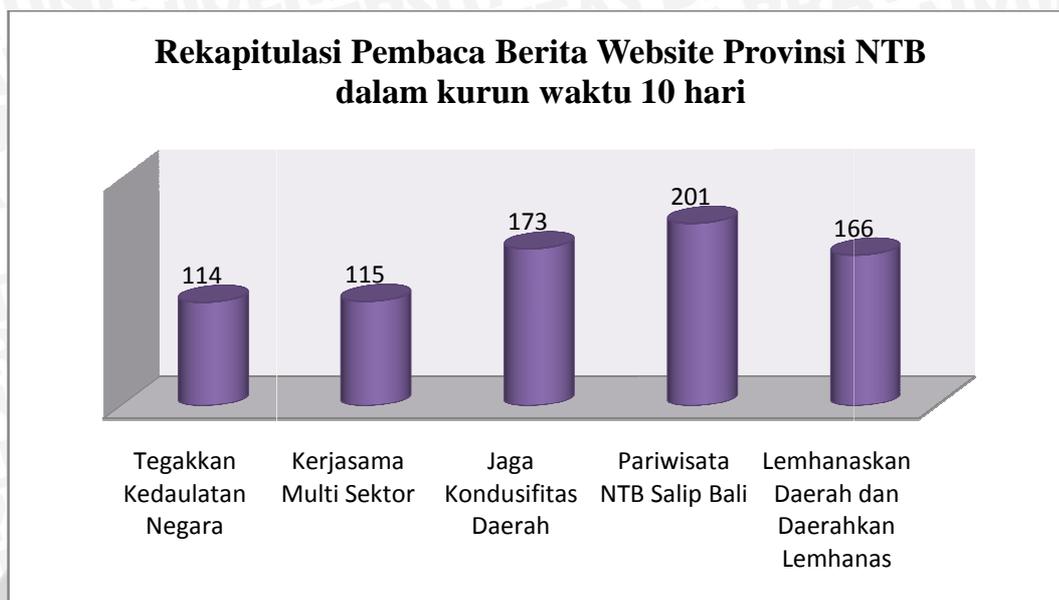
Gambar 5.3 Berita Website PPID Provinsi NTB “*Training Mekanisme Pengolahan Informasi dan Dokumentasi*”



Sumber: ppidntbprov.go.id

PPID merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yakni lembaga di bawah naungan Dishubkominfo Provinsi NTB yang memiliki kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab dalam penumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, serta distribusi mengenai pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi NTB. Sama seperti halnya website Provinsi NTB, website PPID ini dikelola langsung oleh Dishubkominfo Provinsi NTB untuk menginformasikan kegiatan Pemerintah Provinsi NTB.

Grafik 5.4 Rekapitulasi Pembaca Berita Website Provinsi NTB



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Peneliti juga mengutip beberapa pendapat akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram mengenai kenugaaan website *ntbprov.go.id* untuk menambah kritik mengenai efektifitas program *e-government* sebagai berikut:

“....Website juga punya peran yang penting kalau bicara permasalahan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB, karena website ini punya banyak program dan fitur yang unik. Masyarakat tidak perlu lagi membaca koran, cukup buka saja web ini, dan membaca berita yang di update, dan biaya yang cukup murah dan bisa dijangkau dari gadget kita sendiri....”⁷⁷

Peneliti menyajikan beberapa data mengenai pembaca berita website *ntbprov.go.id* melalui pemantauan secara langsung kepada laman web tersebut dengan membandingkan jumlah pembaca pada beberapa berita dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari.⁷⁸ Analisis peneliti mengenai data tersebut sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Khotibul Islam (Ketua Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram) pada Tanggal 29/01/2014 Pukul 19.00 WITA

⁷⁸ Dari survey beberapa jenis berita tersebut, peneliti masih kesulitan terhadap beberapa jenis-jenis berita serta dilaksanakannya penelitian langsung kepada Bagian Kesekretariatan dan PDE sendiri, survey mengenai berapa pembaca setiap harinya, berapa pengunjung website, tidak dilakukan. Hal tersebut menjadikan pemerintah masih kesulitan dalam mengembangkan website tersebut.

Pertama, dari ke-5 (lima) berita di atas, merupakan berita yang langsung dari narasumber M. Zainul Majdi (Gubernur NTB) dan memiliki komposisi berita/informasi yang paling banyak dalam laman web tersebut. Dikatakan demikian, karena foto dan *update* berita merupakan semua kegiatan Gubernur ataupun Wakil Gubernur saja, bukan dari beberapa SKPD atau Dinas lainnya. Hal ini mengindikasikan seakan-akan website dibuat untuk mengetahui kegiatan Gubernur saja, tanpa ada informasi-informasi penting lainnya.

Kedua, data di atas menunjukkan berita yang paling banyak diminati oleh para pengunjung website adalah berita mengenai Pariwisata (201 Pembaca) dibandingkan berita politik atau tata regulasi pemerintahan yang hanya di bawah (175 pembaca). Hal tersebut seakan-akan menjadikan masyarakat hanya menyukai berita mengenai pariwisata, dan website dibuat hanya sebagai kewajiban saja sesuai SOP dari Gubernur NTB. *Ketiga*, mengenai jenis-jenis berita dalam website tersebut masih tidak terkelompokkan ke dalam berbagai jenis, seperti: Berita Ekonomi, Politik, Pembangunan, atau Budaya dan sebagainya, menjadikan pembaca masih tergolong bingung dalam mengonsumsi jenis-jenis berita yang tidak disesuaikan.

5.1.4 Implementasi Relasi Pemerintah dan Pihak Swasta Melalui Program

E-Procurement

Jika dilihat dari bagan alur pemikiran pada bab 3 sebelumnya, *e-procurement* terdapat pada relasi pemerintah dan pihak swasta. Namun, pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan alasan mengapa proses *e-procurement* juga memiliki sedikit peran terhadap kerjasama pihak swasta dengan pemerintah melalui fitur-fitur yang terdapat di dalam website LPSE, secara spesifik sebagai berikut:

Gambar 5.4 Publikasi Informasi Lelang *E-Procurement*

Informasi Lelang			
Kode Lelang	1612037		
Nama Lelang	PENGADAAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014		
Keterangan			
Tahap Lelang Saat ini	Pengumuman Pascakualifikasi Pemberian Penjelasan Download Dokumen Pengadaan		
Agency	Komisi Pemilihan Umum Prov. NTB		
Satuan Kerja	KPU PROVINSI NTB		
Kategori	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	e-Lelang Sederhana	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2014 - APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp 2.098.049.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 1.178.702.927,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran		Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan		Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Langko Nomor 17 Mataram - Mataram (Kota)		
	* Ijin Usaha Ijin Usaha SIUP, TDI/ Surat Ijin Industri di bidang percetakan. izin usaha industri / tanda daftar industri (TDI) di bidang percetakan kualifikasi KECIL, dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku * Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN		

Sumber: lpse.ntbprov.go.id

Pada gambar di atas, dapat dilihat bagaimana produk barang /jasa dalam mempromosikan dan meyakinkan pemerintah yang nantinya ditujukan kepada lembaga KPU di Provinsi NTB. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *e-procurement* memiliki fungsi dalam menyikapi partisipasi masyarakat dan asas transparansi. Fungsi tersebut memiliki manfaat dan sumbangsih yaitu:

Tabel 5.3 Relasi Pemerintah Provinsi NTB dan Swasta melalui Program *E-Procurement*

Partisipasi Masyarakat/ Swasta	Transparansi
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kolom pertanyaan pada website LPSE tersebut, sehingga masyarakat/ pihak swasta kepada pemerintah dapat mempermudah komunikasi antar kedua belah pihak. • Semua pihak swasta dapat memposting produk barang/jasa mereka tanpa dipungut biaya, namun harus mengikuti prosedur yang jelas. • Dalam website LPSE ini juga disediakan fitur <i>Pendaftaran Pelatihan Penyedia, Panitia</i>, maupun <i>Auditor</i> oleh berbagai kalangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat maupun pihak swasta dapat memantau berjalannya pelelangan dan melihat pengumuman pemenang lelang tanpa menggunakan <i>log-in</i>. • Dalam website LPSE, juga disediakan link terkait dengan <i>Pengumuman Lelang Nasional</i> yang merupakan informasi lengkap terkait proses lelang seluruh Indonesia, dan memudahkan para pengguna untuk mengetahui informasi lelang dalam skala nasional.

Sumber: Data di Olah (2014)

Gambar 5.5 Kolom Pertanyaan Website LPSE E-Procurement Pemerintah Provinsi NTB



Sumber: lpse.ntbprov.go.id

Beberapa pemaparan mengenai fitur dari website LPSE di atas, menunjukkan beberapa proses kerjasama yang terjalin antara pihak swasta dengan pemerintah terselenggara atas tipe relasi *e-government* berdasarkan unsur bisnis yang nantinya berfungsi untuk membantu program kerja Pemerintah Provinsi NTB dalam penyelenggaraan infrastruktur maupun pelayanan barang maupun jasa untuk kepuasan masyarakat di Provinsi NTB.

5.1.5 Capaian Tipe Relasi Pemerintah, Media Massa Lokal dan Masyarakat

Dalam sub bab ini, beberapa proses relasi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan dengan menggunakan 3 (tiga) macam tipe relasi *e-government* secara umum. Relasi tersebut antara lain *G2B (Government to bussines)*, *G2C (Government to citizen)* dan *G2G (Government to government)*.⁷⁹ Secara urut, peneliti akan menjelaskan beberapa penjelasan relasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB, media massa lokal, dan masyarakat sebagai berikut:

⁷⁹ Richardus Eko., *Op.Cit*, Hlm.42

1. G2B (*Government to Bussines*)

Government to bussines dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai Pemerintah Provinsi NTB menggunakan praktik *e-government* untuk bekerjasama dan menjalin relasi dengan unsur bisnis atau melakukan penempatan saham. Namun artian bisnis tersebut merupakan kepada para pemegang saham, maupun perusahaan, juga pada relasi pihak swasta mewujudkan program kerja dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan:

- a. Adanya saham yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB melalui Kepala Biro Ekonomi dan Asisten II Sekertaris Daerah Setda Provinsi NTB, kepada PT. Suara Nusa Media Pratama/media cetak (Lombok Post).⁸⁰
- b. Program *e-procurement* yang disajikan oleh Bagian Kesekretariatan PDE dapat membantu pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengembangkan proses pembangunan seperti Infrastruktur baik produk barang maupun jasa melalui website LPSE.
- c. Terkait media *online* *Lombokita.com* yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Gubernur NTB sendiri, menjadikan media ini sebagai *patner/mitra* bisnis antara media dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan pemaparan 2 (dua) hal di atas, relasi pemerintah dengan media massa lokal di NTB menjadikan terselenggaranya tipe relasi *G2B* di Setda Provinsi NTB lebih terjalin solid.

2. G2C (*Government to Citizen*)

Government to citizen dimaksudkan sebagai jalinan relasi antara pihak Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat, melalui program *e-government* yang diciptakan Pemerintah Provinsi NTB dalam mempengaruhi beberapa kebijakan dan proses komunikasi antar kedua belah pihak. Tipe relasi ini juga memiliki penjelasan alasan sebagai berikut:

⁸⁰ Wawancara dengan Alfian Yusni (Pimpinan Redaksi Lombok Post) pada Tanggal 20/02/2014 Pukul.15.00 WITA

- a. Sesuai dengan Pergub NTB No.20 Tahun 2008, terselenggaranya program *e-government* (*sms center* dan *website*) pada akhir Tahun 2008 lalu, yang dimaksudkan sebagai perantara antara pemerintah untuk menjalin komunikasi dan pendistribusian informasi kepada masyarakat.⁸¹
- b. Beberapa aspek kelembagaan yang terkandung dalam *G2C* ini, menjadikan beberapa Dinas seperti: PPID dan Inspektorat Provinsi NTB menjadi lembaga pengawas dari berjalannya program *e-government* dari Setda Provinsi NTB terkait beberapa penyelewengan informasi baik (*sms center* dan *website*) untuk dilaporkan kepada Dinas tersebut.
- c. Terkait dengan konsep *networking governance* dari Wayne R. Leach dalam penelitian ini yang mengacu kepada 3 (tiga) aspek: Pemerintah, media massa, dan masyarakat, peneliti menggunakan unsur *Top-Down* dan *Bottom-Up* sebagai relasi pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan berjalannya tipe relasi *G2C* seperti yang telah dijelaskan di atas, diharapkan relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan seimbang tanpa mengurangi posisi masyarakat sebagai penikmat dan pelaksana kebijakan, dan pemerintah sebagai *stakeholder*.

3. *G2G (Government to Government)*

Government to government dimaksudkan untuk menelaah relasi antar pemerintah di Provinsi NTB melalui program *e-government*. *G2G* juga dimaksudkan agar memperlancar hubungan antar pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Analisis relasi *G2G* pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. *Sms center* dibentuk bukan hanya untuk menerima sms masuk dari para masyarakat kepada pemerintah, melainkan fungsi *sms center* lainnya adalah menyebarkan undangan kepada Dinas/SKPD lainnya di Provinsi NTB mengenai acara, hingga undangan rapat dari Gubernur.
- b. Hubungan yang terjalin antara Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dengan PPID Dishubkominfo NTB mengenai pengimplementasian

⁸¹ SOP Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Provinsi NTB

publikasi akses informasi, dan pengawasan menjadikan relasi antar Dinas dapat terjalin dan terkoordinasi secara baik.

- c. Proses *sms center* sejatinya tidak hanya melibatkan pihak Humas dan Protokol serta Kesekretariatan dan PDE saja, melainkan proses tersebut bisa disebarluaskan */forward* menurut isi dari sms yang masuk kepada Dinas/SKPD yang bersangkutan. Hal tersebut menjadikan relasi yang terjalin serta aspek komunikasi antar pemerintahan di Provinsi NTB dapat berjalan.

Dari beberapa tipe relasi di atas, dapat disimpulkan proses relasi yang terjalin antara pemerintah, media massa lokal dan masyarakat untuk mewujudkan unsur keterbukaan informasi publik sudah terjalin dengan seimbang. Dari sub bab sebelumnya juga telah dijelaskan bentuk kerjasama, proses, maupun berbagai bentuk program *e-government* dan media massa lokal, serta data-data yang langsung diperoleh pemerintah dan media massa lokal setempat.

5.2 Efektifitas Penggunaan Program *E-Government* dan Media Massa Lokal dalam Keterbukaan Informasi Publik

Setelah menjelaskan mengenai relasi di atas, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai ukuran efektifitas atau mengukur sejauh mana program dari pemerintah melalui *e-government* dengan media massa lokal untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Secara umum, pengaruh efektifitas serta cakupan dalam penyelenggaraan program tentunya dinilai dari seberapa besar dan baiknya perantara tersebut pada konsumsi informasi dan kebutuhan mengenai komunikasi dengan masyarakat. Pemaparan mengenai pentingnya efektifitas diselaraskan dengan pendapat informan sebagai berikut:

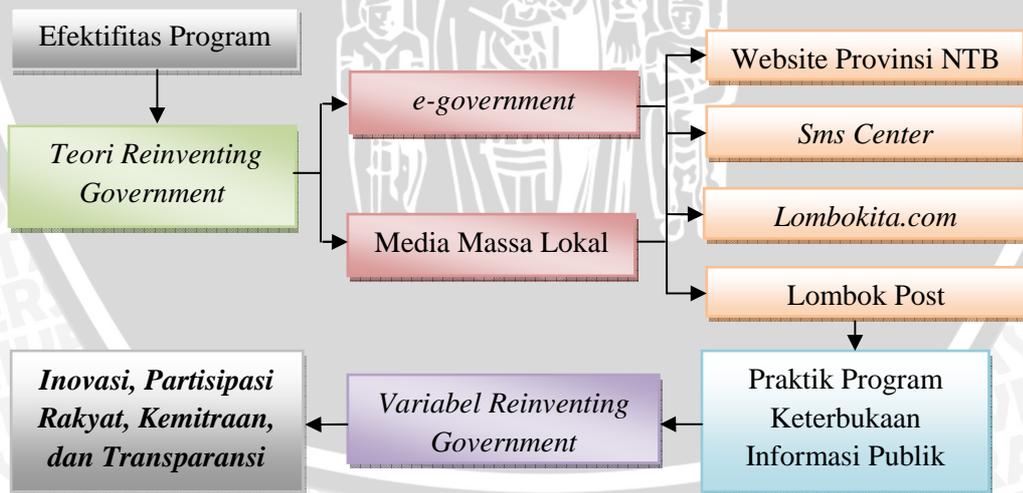
“...Menjelaskan mengenai efektifitas dan melihat kepuasan program e-government dari pemerintah memang cukup sulit, terlebih beberapa masyarakat ingin kalau semua informasi maupun rahasia dapur pemerintah sekalipun harus dibeberkan kepada publik. Terlebih, kalau media ikut turun tangan pada proses publikasi informasi dari beberapa informasi yang tidak boleh di publish, pasti menimbulkan beberapa pertanyaan baru. Usutan

mengenai UU No.14 Tahun 2008 yang harus dijalankan masyarakat memang cukup berat. Tapi, semua bisa diselesaikan pemerintah kalau patuh pada aturan dari sistem keterbukaan informasi publik itu...”⁸²

Sebagaimana dijelaskan oleh Khotibul Islam pada argument di atas, pentingnya mengukur keefektifan penggunaan program menjadi hal yang sangat penting. Peneliti juga membahas mengenai rumusan masalah ke 2 (dua) ini dengan menggunakan teori-teori guna membantu akurasi serta pemahaman mengenai efektifitas penggunaan program *e-government* dan media massa lokal menurut kacamata akademis.

Teori yang ditawarkan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 (dua) di atas, merupakan teori *reinventing government* dari David Osborne (1992) yang nanti akan dijelaskan pada bagian akhir penelitian ini. Berikut akan dijelaskan secara sistematis mengenai proses penilaian efektifitas program *e-government* dan media massa lokal melalui bagan seperti dibawah ini:

Bagan 5.3 Skema Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik



Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Skema efektifitas disusun untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan proses pengukuran efektifitas dari program tersebut sebagai tersebut:

⁸² Wawancara dengan Khotibul Islam., *Op.Cit*

Pertama, efektifitas program dilihat dari kacamata teori David Osborne yaitu *reinventing government* yang menjelaskan ukuran aplikasi yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan beberapa unsur pembentuk. *Kedua*, teori tersebut diaplikasikan kepada 2 (dua) program utama dalam penelitian ini, yaitu *e-government* dan media massa lokal serta dilihat dari bekerjanya program tersebut untuk mewujudkan transparansi maupun akuntabilitas dari pemerintah dalam unsur keterbukaan informasi publik yang dalam hal ini direalisasikan atas relasi dengan media massa lokal.

Ketiga, adalah tujuan utama dalam bagan tersebut adalah mengukur efektifitas, serta kepuasan masyarakat terhadap program keterbukaan informasi publik. Ukuran yang akan digunakan, yaitu variabel dari *indikator reinventing government*.⁸³ Maka dari itu peneliti menggunakan unsur pembentuk dari efektifitas untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB tidak luput dari teori yang membantu menjawab rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini.

5.2.1 Membaca Keterbukaan Informasi Publik dalam Relevansinya Terhadap Beberapa Aspek Pendukung

Dalam membahas mengenai keterbukaan informasi publik, proses informasi, komunikasi, maupun akuntabilitas yang selalu dihadapkan kepada pemerintah tidak semata hanya membahas hal-hal tersebut. Proses hukum yang mencantumkan UU No.14 Tahun 2008 di dalam hal ini tentunya tidak boleh dikesampingkan dan dijadikan pegangan semata. Urgensi dari perkembangan undang undang tersebut sangat diharapkan oleh pemerintah untuk meraih

⁸³ Variabel dari *indikator reinventing government* merupakan beberapa variabel dari indikator-indikator lain yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, untuk mengukur efektifitas penggunaan program tersebut yang tentunya bersumber dari teori *reinventing government*.

kesuksesan serta membuahkan hasil yakni terwujudnya *good governance* dan *clean government*.⁸⁴

Peneliti menjelaskan keterbukaan informasi publik di dalam hal ini tidak selalu mengaitkannya dengan program-program, maupun efektifitas penggunaan, hingga kepuasan masyarakat, melainkan bagaimana relevansinya terhadap kinerja pemerintah, hingga konteks-konteks apa saja yang dituju oleh pemerintah. Kedua aspek tersebut pada dasarnya dapat terjawab dengan implementasi dan kinerja pemerintah dari UU keterbukaan informasi publik yang sudah ada.

Namun, pada kenyataannya, dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber-narasumber terkait (khususnya Kepala Bagian/SKPD), masih banyak hal-hal yang perlu dimatangkan hingga kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB sendiri.

Keterbukaan informasi publik diposisikan sebagai pilar dalam menyelaraskan program yang dibuat oleh pemerintah dengan kebutuhan, permintaan, serta tuntutan masyarakat. Mengenai isu keterbukaan, hal tersebut merupakan akuntabilitas (tanggung jawab) dari publik dalam menyikapi serta merespon, serta legitimasi dari pemerintah. Jika dilihat dari beberapa konteks dan relevansi, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, seperti yang dijelaskan dibawah ini:⁸⁵

⁸⁴ *Clean government* dimaksudkan sebagai perwujudan sistematis antara *good governance* atau yang kerap disebut pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dalam hal ini adalah berdasarkan beberapa unsur dari keterbukaan informasi publik seperti *opennes*, *transparency*, dan *accountability* serta akses demokrasi yang terselenggara.

⁸⁵ Arie Sujito, *Keterbukaan Informasi Publik Pasca UU No.14 Tahun 2008 Dalam Catatan Reflektif*, Jogjakarta: FISIPOL UGM, 2012. Hlm.4

a. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan menjelaskan kaitan antara instalasi dari perangkat-perangkat kelembagaan yang membantu menopang keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Kelembagaan yang dimaksud juga beberapa SKPD yang memiliki kepentingan untuk mengurus kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini merupakan:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)
2. Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB
3. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
4. Sub Bagian Santel dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi NTB
5. Inspektorat Provinsi NTB
6. Komisi Informasi Provinsi NTB
7. Serta beberapa SKPD lain yang menggunakan program *e-government*

b. Aspek Substantif

Aspek substantif mengembangkan peranan-peranan di dalam keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan di Provinsi NTB, dengan kaitannya pada beberapa media massa untuk menyampaikan informasi, dan publikasi. Kemudian jenis-jenis dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah, seperti pengumuman, himbauan, hingga kebijakan serta tingkat kemudahan jangkauan dalam penyampaian publikasi dari informasi tersebut kepada masyarakat.

Kedua aspek dalam menjelaskan penelitian ini, mengarahkan keterbukaan informasi publik kepada beberapa relevansi dari implemmentasi kegiatan yang ada di Provinsi NTB dengan faktor yang membantu meneliti terselenggaranya keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Adapun beberapa alasan dalam penggunaan program tersebut diharuskan mengukur keefektifan program untuk memancing masyarakat dalam merespon informasi sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ Khotibul Islam, *Informasi Publik: Anda Berhak Tau*, Mataram: LSBH NTB, 2010. Hlm.7

1. Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dari masyarakat terhadap program *e-government* yang diselenggarakan Setda Provinsi NTB terkait kekurangan serta penyempurnaan akses informasi kepada masyarakat.
2. Menjembatani *Democratic Government* dalam menyikapi proses demokratisasi dari aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
3. Terkait *Open Government*, atau pemerintahan yang terbuka dan transparansi publik, program pemerintah dituntut untuk menjadi akses yang baik, dalam menyelenggarakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.
4. Menyelaraskan UU keterbukaan informasi publik dengan mandat dari konsitusi UUD 1945, Pasal 28 F yang diharapkan untuk mampu membuka tabir gelap informasi publik yang selama ini ditutupi oleh pemerintah.
5. Memperjelas dan memudahkan akses informasi kepada masyarakat dengan cepat, mudah, sederhana, serta mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat NTB.
6. Memancing partisipasi masyarakat dan desakan yang kuat terhadap percepatan proses pembangunan daerah (terutama Provinsi NTB) ke dalam aspek yang mengalami kekurangan, seperti: Perekonomian, Pertanian, dsb.

5.2.2 Program Media Massa Lokal dalam Proses Publikasi Informasi

Dalam sub bab ini, peneliti selanjutnya akan menerangkan mengenai peran media massa lokal yang telah menjadi mitra dari Pemerintah Provinsi NTB dalam menyebarkan Informasi dan Publikasi. Peran tersebut dijelaskan dalam bentuk program yang diluncurkan dari media massa tersebut yang kemudian di rekomendasikan oleh peneliti sebagai program keterbukaan informasi publik.

Program-program dari beberapa media massa di atas merupakan program yang diunggulkan untuk mengimplementasikan kegiatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB dan tentunya sesuai dengan gaya, serta kualitas dari karakteristik media massa tersebut. Beberapa proses dari media massa lokal dengan program *e-government* mengenai relasi antar kedua belah pihak dalam unsur *networking governance*, dalam unsur pembentuk keterbukaan informasi publik yaitu *opennes*, *accountability* dan *transparency* sebagai berikut:

Tabel 5.4 Program Relasi E-Government dan Media Massa Lokal dalam Unsur Pendukung Konsep *Networking Governance*

Unsur	Program E-Government	Media Massa Lokal
Oppenes (Keterbukaan)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sms center</i> diciptakan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Tentunya jawaban/ balasan dari program ini kepada pengguna dapat di <i>share</i> langsung kepada masyarakat lainnya, dengan 3 (tiga) cara: balasan langsung, website, dan Lombok Post yang mengarah pada unsur <i>oppenes</i>. • Di dalam fitur website Provinsi NTB, akan disuguhkan unsur <i>oppenes</i> yaitu melalui informasi jadwal kegiatan gubernur (kepala daerah), kegiatan Setda maupun SKPD di Provinsi NTB, hingga kebijakan yang di tampilkan dalam berita <i>online</i> website. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombok Post</i> memiliki relasi yang sama dengan <i>sms center</i> yaitu mengekspose jawaban dari SKPD/ Gubernur yang dicantumkan dalam koran yang diterbitkan setiap hari senin. • <i>Lombokita.com</i> mencantumkan sub <i>domain</i> website Provinsi NTB di dalam <i>link</i> tersebut guna membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan pemerintah dengan mempermudah dengan satu kali <i>klik</i>.
Transparency (Transparansi)	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan <i>sms center</i>, masyarakat bisa langsung menanyakan dan mengkonfirmasi mengenai program kerja yang sedang dilakukan oleh SKPD maupun Gubernur. • Mengenai Program Kerja Pemerintah Provinsi NTB mengenai Pembangunan Masjid <i>IC</i> di NTB, masyarakat menemukan transparansi pemasukan dan pengeluaran keuangan dari pembiayaan pada laman website Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombok Post</i> yang menjalin kemitraan dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE bekerjasama dengan unsur transparansi mengenai postingan jawaban <i>sms center</i> di media tersebut dan tersedianya <i>space</i> bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mempublikasikan sesuatu. • <i>Lombokita.com</i> mempublikasikan berita-berita terkait transparansi melalui jejaring sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengunjungi laman web mereka.
Accountability (Tanggung Jawab)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat bebas untuk meminta konfirmasi dan menanyakan sesuatu serta kritikan mengenai tanggung jawab Gubernur/ Kepala SKPD terkait, jika terjadi penyimpangan/ kekeliruan dalam pelaksanaan pemerintahan melalui <i>sms center</i>. • Unsur <i>accountability</i> yang terdapat pada website adalah fitur layanan publik yang mendasari pertanggung jawaban mengenai informasi dari pelayan publik SKPD Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena Pemerintah Provinsi NTB memiliki saham pada <i>Lombok Post</i>, media tersebut dituntu untuk memiliki nilai tanggung jawab terhadap penjembitan publikasi dari Pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat. • Kepemilikan <i>Lombokita.com</i> secara utuh dimiliki oleh Gubernur NTB, tentunya media ini dituntu untuk profesional dalam menjembatani proses publikasi kepada masyarakat.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)



Penjelasan mengenai relasi seperti di atas menunjukkan satu dari dua rumusan masalah pada penelitian ini sudah terjawab dengan menggunakan pemaparan program *e-government* dan media massa lokal hingga penggunaan konsep *networking governance*. Relasi tersebut menjadikan Provinsi NTB dapat terbantu dan memperoleh percepatan hingga proses yang dirasa cukup maksimal dalam implementasi UU No.14 Tahun 2008.

5.2.3 Publikasi Informasi Kepada Masyarakat Sebagai Urgensi Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah

Public Services / pelayanan publik yang merupakan tugas pokok utama dari pemerintah, memang menjadikan posisi strategis dan prioritas utama masyarakat untuk menganggap pemerintah sebagai pelayan yang baik bagi mereka. Pelayan juga dimaksudkan untuk mengatasnamakan pemerintah sebagai lembaga penting bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sub bab ini, pelayanan publik dijadikan sebagai landasan utama, mengapa pemerintah mencipatakan beberapa program *e-government* dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Beberapa argumen diungkapkan oleh mantan Wakil Gubernur NTB, mengenai urgensi pelayanan publik dalam membentuk proses publikasi informasi kepada masyarakat sebagai berikut:

*“Fungsi Pemerintah pada dasarnya, hanya memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam perwujudan Fungsi Organik Pemerintahan, diantaranya adalah Fungsi Perlindungan, Fungsi Pelayanan, dan Fungsi Pemberdayaan. Dari ke tiga fungsi tersebut, fungsi pelayanan adalah elemen terpenting dalam kegiatan implemntasi keterbukaan informasi publik. Karena memiliki jenis pelayanan yang berbeda pula, diantaranya adalah pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa”*⁸⁷

⁸⁷ Badrul Munir, *Urgensi Keterbukaan Informasi dan Relevansinya Bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi NTB*, Mataram: Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2012. Hlm.2

Terkait pemaparan pelayanan publik di atas, tentunya sudah tidak diragukan lagi mengenai konsep pelayanan publik yang mengarah kepada keinginan masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah. Hal tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menjangkau otonomi daerah, peneliti menganalisis tujuan otonomi yang diselenggarakan oleh beberapa media massa lokal tersebut.

Tabel 5.5 Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik dalam Fungsi Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi	Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi NTB
<p>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program <i>e-government</i> dirancang pemerintah untuk menjalin komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalui faktor yang lebih modern dan efisien. • Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengembangkan relasinya dengan media massa lokal yang cenderung lebih menarik perhatian dari masyarakat untuk tanggap terhadap kebijakan, maupun informasi dari pemerintah melalui media massa lokal tersebut. • Dengan adanya Partisipasi aktif dari masyarakat untuk tanggap terhadap permasalahan serta kinerja pemerintah, maka implementasi keterbukaan informasi publik dapat mengembangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahnya.
<p>Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui program <i>e-government</i>, pemerintah meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik dengan lebih mudah dijangkau, efisien, dalam gapaiannya terhadap masyarakat. • Akses Informasi dan publikasi dalam pelayanan publik juga sudah terselenggara dalam relasi pemerintah dengan media massa lokal, beberapa SKPD terkait, hingga swasta (mewakili institusi media massa). • Memaksimalkan kualitas pelayanan publik terhadap perilaku masyarakat yang seolah-olah <i>haus</i> informasi, dan memberikan transparansi kepada masyarakat melalui program <i>e-government</i> dan hasil dari koordinasi dengan media massa.

Tujuan Otonomi	Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi NTB
<p>Meningkatkan Daya Saing Antar Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui program <i>e-government</i> Setda NTB, persaingan antar Provinsi yang diadakan oleh Kemendagri, menjadikan Provinsi NTB sebagai Provinsi Peringkat ke-4 terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik se-Indonesia.⁸⁸ • Daya saing menjadikan hubungan koordinasi antar SKPD antar Provinsi di Indonesia, khususnya Implementasi keterbukaan informasi publik semakin erat. Contoh: Pegawai Pemerintah Provinsi NTB mengikuti pelatihan implementasi <i>e-government</i> ke Setda Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010.⁸⁹ • Melalui relasinya dengan media massa lokal, Pemerintah Provinsi NTB dipermudah untuk mengetahui berita/informasi terbaru mengenai prestasi-prestasi Provinsi lainnya, yang membantu memotivasi kinerja pemerintah menjadi lebih aktif.

Sumber: Badrul Munir (2012)

5.2.4 Faktor Demokratisasi Dalam Membaca Pencapaian Koordinasi E-Government dan Media Massa Lokal

Sehubungan dengan pembahasan utama dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik, tentunya tidak sah jika peneliti tidak membahas mengenai faktor demokrasi yang menjurus kepada masyarakat, sebagai tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam pelayanan publik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi UU No.14 Tahun 2008 sebagai berikut:⁹⁰

“Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki, serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;”⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan I Gede Aryadi., *Op.Cit*

⁸⁹ Wawancara dengan Sena Puja., *Op.Cit*

⁹⁰ Penjelasan Atas UU No.14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, Bagian Umum.

⁹¹ Secara tidak langsung dalam pasal tersebut menjelaskan kaitan antara *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan 3 (tiga) unsur utama yaitu tanggung jawab, keterbukaan, dan transparansi. Dan faktor demokrasi merupakan modal utama dari terlaksananya unsur-unsur pembentuk tersebut dalam mengemban istilah yang familiar dari kata “Demokrasi” sendiri yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik memang dinilai sangat penting, karena beberapa unsur dalam demokrasi yaitu: *Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat* yang berarti informasi tersebut berasal dari pandangan serta penilaian masyarakat, lalu oleh rakyat berarti rakyat yang memiliki kapasitas untuk menjalin relasi yang baik dengan pemerintah demi tersajinya informasi yang akurat, serta *untuk rakyat* berarti informasi maupun kebijakan tersebut disajikan untuk rakyat dan dikonsumsi *oleh rakyat* itu sendiri.

Argumen tersebut juga diperkuat dengan UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang berbunyi: “*melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*”⁹² dimana pernyataan tersebut dalam keterbukaan informasi publik.

Tabel 5.6 Faktor Pendorong Demokrasi dalam Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Program <i>E-Government</i>	Media Massa Lokal
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sms center</i> membuktikan program tersebut menjadi program yang selalu memiliki “<i>pelanggan</i>” dalam implementasinya mengenai proses demokrasi di Provinsi NTB. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya persentase pengguna setiap tahunnya dari masyarakat yang menggunakan program tersebut. • <i>Website Provinsi NTB</i> menyediakan posting komentar (melalui berita <i>online ntbprov.go.id</i>) dan <i>e-mail</i> langsung yang ditujukan kepada SKPD terkait guna menyampaikan komentar, pertanyaan, pendapat yang merupakan perjalanan dari faktor demokrasi di Provinsi NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombokita.com</i> sama seperti halnya Website Provinsi NTB yaitu membaca berita harian <i>online</i>, namun kelebihanannya adalah berita tersebut bisa di <i>share</i> di media sosial, dan memiliki fitur <i>blog warga</i> sebagai pendorong demokrasi. yang berisi berita, informasi, pendapat, saran, maupun kritikan dari masyarakat yang diposting secara gratis. • <i>Lombok Post</i> menjadi satu-satunya media <i>non elektronik</i> (cetak harian) yang dapat dianalisis programnya dengan faktor demokrasi melalui fitur <i>Opini</i> dan <i>Public Serives</i>. Fitur yang dimaksud adalah memposting beberapa opini dari masyarakat, serta bantuan dari Lombok Post untuk menyikapi permasalahan pelayanan publik.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

⁹² Dalam Bab IV Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004, mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, dijelaskan pula beberapa asas yang termasuk dalam konsep *good governance* dan unsur pembentuk dari *networking governance* yaitu: Asas Akuntabilitas, dan Asas Keterbukaan. Unsur Demokrasi juga terdapat pada Pasal 22 mengembangkan kehidupan demokrasi; dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

5.2.5 Transparansi Program *E-Government* Terhadap Korelasinya Kepada Media Massa Lokal

Pada sub bab sebelumnya, implementasi *reinventing government* seperti inovasi: *sms center* dan website, partisipasi rakyat, dan kemitraan yang dijalin mengenai program *e-government* dengan media massa lokal, dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan transparansi dari implementasi program *e-government* dari pemerintah serta hubungan korelasinya dengan media massa.⁹³ Transparansi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari terselenggaranya program *e-government* dan mewujudkan hak masyarakat sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tersebut.

Adapun implementasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) akses, masing-masing dari program *e-government* serta hubungan kemitraan melalui *korelasi e-government* dengan media massa lokal. Adapun bentuk implementasi transparansi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Bentuk Implementasi Transparansi *E-Government* dengan Media Massa Lokal

<i>Sms Center</i>	Website Provinsi NTB
<ul style="list-style-type: none">• Dalam media cetak <i>Lombok Post</i>, Bagian Kesekretariatan dan PDE melalui program <i>sms center</i> telah menjalin kerjasama terkait unsur transparansi dengan adanya postingan balasan sms dari Gubernur NTB sendiri dalam <i>space</i> media cetak tersebut.• Unsur transparansi selanjutnya dilihat pada postingan jawaban dari isi <i>sms center</i> pada website Provinsi NTB. Hal tersebut dimaksudkan agar para masyarakat yang mengunjungi laman website, dapat mengetahui isi dari <i>sms center</i> terkait keluhan dari masyarakat lainnya.	<ul style="list-style-type: none">• Proses transparansi website Provinsi NTB dengan media <i>Lombokita.com</i> terlihat pada laman website <i>Lombokita.com</i> yang mencantumkan situs link dari website Provinsi NTB di bagian sebelah kanan website. Hal ini mempermudah pengunjung untuk melihat website Provinsi NTB.• Melalui persamaan jenis media <i>online</i> antara <i>Lombokita.com</i> dan website Provinsi NTB, proses transparansi mengenai informasi mentah (informasi yang di dapatkan dari Pemerintah Provinsi NTB) yang nantinya akan di bagikan kepada media <i>Lombokita.com</i> bersifat terbuka. Artinya tidak ada unsur saling menutupi antara kedua media massa ini.

⁹³ Asep Arifin., *Op.Cit*, Hlm.23

Sms Center	Website Provinsi NTB
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lombok Post</i> juga memberikan <i>space</i> kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mempublikasikan atau mengumumkan berita/informasi atau kebijakan di dalam bagian program harian Lombok Post. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan disediakannya file <i>download</i> mengenai data-data/dokumen penting menyangkut Provinsi NTB, unsur transparansi dalam website ini sangat membantu masyarakat dalam unsur keterbukaan informasi publik.

Sumber: Data di Olah (2014)

Gambar 5.6 Contoh Postingan isi Sms Center pada Media Massa Cetak Lombok Post



Sumber: Lombok Post edisi 26 November 2012

Gambar 5.7 Postingan Laman Website Provinsi NTB pada Lombokita.com



Sumber: Lombokita.com (2014)

Pemaparan mengenai transparansi di atas menunjukkan bahwa proses berjalannya *e-government* sedikit banyak dipengaruhi oleh campur tangan media massa lokal yang membantu. Gambar disamping merupakan perwujudan relasi antara *e-government* (*sms center*) dengan media cetak *Lombok Post* dalam program *Rubrik Aspirasi* dengan memposting pertanyaan dan jawaban dari program *sms center*.

BAB VI PENUTUP

Pada bab 6 (enam) ini, tiba pada akhir dari bagian pencapaian penelitian yang sudah dilaksanakan dengan membahas 2 (dua) rumusan masalah, yakni permasalahan relasi, dan efektifitas *e-government* dan media massa lokal untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan, serta serangkaian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, tentunya peneliti akan membahas pula bagaimana hasil capaian atau kesimpulan, dan rekomendasi atas beberapa kesimpulan-kesimpulan serta temuan-temuan yang telah didapatkan dari analisis rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian mengenai keterbukaan informasi publik. Beberapa hasil capaian dan rekomendasi akan dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

Hasil Capaian dalam sub bab ini dimaksudkan, untuk menjelaskan apa saja yang telah dicapai dari beberapa pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan diatas, terhitung dari penulisan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga dalam proses penulisan penelitian ini dilaksanakan. Karena penelitian ini terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah yang berbeda, maka peneliti membagi hasil capaian menjadi 2 (dua) bagian, dan dijelaskan sebagai berikut:

6.1.1 Capaian Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal

Capaian relasi dimaksudkan untuk membahas beberapa hasil capaian dari berlangsungnya relasi antar kedua belah pihak, dengan analisis-analisis yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung, hingga penulisan penelitian ini sampai pada bab ini. Capaian relasi tersebut dirangkum sebagai berikut:

Pertama, dari relasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dengan ke 4 (empat) serta beberapa SKPD seperti PPID, Inspektorat, maupun Gubernur menjadikan informasi mengenai berita, kebijakan, hingga himbauan/pengumuman dari pemerintah bisa diawasi, dianalisis kebenarannya serta bersifat saling mengawasi antar pihak. Dengan adanya pengawasan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keabsahan informasi yang tersaji, baik dari Pemerintah Provinsi NTB, maupun media massa lokal tersebut.

Kedua, yakni berjalannya asas dari *e-government* *G2B* (*Government to bussines*), *G2C* (*Government to citizen*) dan *G2G* (*Government to government*) menandakan berhasilnya relasi yang dijalin pemerintah kepada media, serta pemerintah kepada pemerintah lainnya, khususnya dalam menyikapi keterbukaan informasi publik. Keberhasilan relasi ini juga ditandai dengan adanya unsur pembentuk seperti tanggung jawab, keterbukaan, dan transparansi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB kepada media massa lokal yang setara dengan pengaplikasian unsur *networking governance*.

Ketiga, adalah dengan terbentuknya forum wartawan pemprov yang keberadaannya bertujuan untuk mempermudah akses dari pers media massa, untuk memperoleh informasi/berita langsung dari pihak Setda Provinsi NTB melalui Bagian Humas dan Protokol, menjadikan relasi tersebut terjalin secara bersih. Akan tetapi hal tersebut, tidak menjadikan semata-mata media yang tergabung dalam forum wartawan pemprov tersebut di “*anak emas*” kan, melainkan untuk mempermudah akses saja dan menjalin relasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi NTB.

6.1.2 Capaian Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Capaian efektifitas dimaksudkan untuk membahas beberapa hasil capaian dari diluncurkannya beberapa program dari pemerintah melalui *e-government* dan program media massa lokal, dengan analisis-analisis yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung, hingga penulisan penelitian ini sampai pada bab ini. Capaian efektifitas tersebut dirangkum sebagai berikut:

Pertama, efektifitas dijadikan sebagai wadah untuk menilai persepsi masyarakat terhadap perkembangan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Efektifitas tersebut berwujud seperti kepuasan masyarakat, serta partisipasi (antusiasme) masyarakat terhadap perkembangan informasi/berita yang tersaji melalui akses *e-government* dan media massa lokal dengan catatan, masyarakat juga harus peka dan tidak buta akan informasi yang disajikan oleh pemerintah.

Kedua, adalah efektifitas dijadikan sebagai modal utama dalam menimplementasikan proses demokrasi dalam keterbukaan informasi publik. Karena dalam pengukuran efektifitas tersebut, tidak hanya di ukur dari segi pemerintahnya saja, tetapi program dari media massa lokal dengan konten informasi dari Pemerintah Provinsi NTB juga merupakan proses dari demokrasi mengenai aspirasi dan permintaan masyarakat.

Ketiga, adalah proses dari penilaian efektifitas program ini dijadikan sebagai implementasi dari transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menunjang *good governance* di Provinsi NTB, serta aplikasi dari UU No.12 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Serta memberikan pilihan kepada masyarakat mengenai proses publikasi informasi yang tidak hanya dari pemerintah, melainkan dari media massa lokal tersebut.

6.2 Rekomendasi

Dari berbagai proses penelitian yang telah dijalankan oleh peneliti selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga proses penulisan laporan penelitian ini sampai pada bab akhir, tentunya peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menjadi kendala utama proses keterbukaan informasi publik dan memiliki rekomendasi, atau sebatas saran, untuk menganalisis dan meminimalisir kendala tersebut, demi memperlancar implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Beberapa rekomendasi tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

6.2.1 Rekomendasi Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Pertama, peneliti sangat mengharapkan jika beberapa media massa lokal tersebut sebaiknya melakukan evaluasi-evaluasi hingga pantauan secara *intern* terhadap efektifitas program-program yang disajikan dan kepuasan masyarakat dari masing-masing media di dalam akses keterbukaan informasi publik. Hal ini bisa disimpulkan agar media massa dapat memahami perkembangan dan permintaan pengguna informasi/berita yang dipublikasikan melalui programnya, agar tidak bosan kepada media tersebut.

Kedua, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 mengenai lembaga penyiaran publik, perlu diciptakannya program-program unggulan yang *real* dan khusus dari Pemerintah Provinsi NTB kepada media massa lokal, yang secara langsung narasumber harus didatangkan dari pihak Setda Provinsi NTB, semisal dialog/siaran mengenai permasalahan atau *press conference* selama satu minggu sekali atau dua minggu sekali kepada pihak media dan masyarakat. Pada dasarnya hal tersebut telah ada, namun kurang intensnya waktu yang digunakan, menjadikan transparansi kepada masyarakat dirasakan cukup kurang.

Ketiga, berkaca dari media lokal *Lombokita.com* yang mempromosikan dan memiliki jejaring sosial sendiri dalam mengundang masyarakat untuk mengunjungi website mereka, Pemerintah Provinsi NTB juga diharapkan memiliki jejaring sosial resmi, seperti (*Twitter*, dan *Facebook*) untuk membantu berjalannya aspek keterbukaan informasi publik melalui website resmi Provinsi NTB yang setiap harinya menginformasikan perkembangan seputar NTB.

6.2.2 Rekomendasi Relasi Pemerintah dengan Media Massa Lokal

Pertama, seiring dengan adanya unsur partisipasi rakyat dalam indikator efektifitas di atas, khusus untuk media massa lokal *Lombokita.com* dan Lombok Post, disarankan untuk membuat program khusus dalam bentuk kolom komentar bagi masyarakat untuk berpendapat, komentar, kritik maupun saran dalam menganalisis kinerja pemerintah, hingga pelayanan publik (setara *sms center*) untuk membantu unsur partisipasi dalam keterbukaan informasi publik.

Kedua, dari aspek kelembagaan yang telah terjalin, tentunya diharapkan agar koordinasi yang terjalin antara beberapa lembaga seperti PPID, Beberapa bagian dari Setda Provinsi NTB, dan media massa lokal, untuk saling mengawasi dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan dari proses implementasi program-program keterbukaan informasi publik.

Ketiga, yaitu meningkatkan intensitas relasi yang terjalin antara pihak pemerintah dengan media massa lokal, maupun antar media massa lokal lainnya, agar tidak terjadi ketimpangan atau *miss komunikasi* mengenai proses *share data* antar pemerintah dengan media lokal, maupun antar media lokal. Karena sering sekali terjadi permasalahan mengenai *input data* dari Pemerintah Provinsi NTB yang disebarkan kepada media lainnya, kemudian terjadi kesalahan, baik secara tidak disengaja, maupun salah dalam akses informasi.

6.2.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat

Pertama, yakni berinisiatif melakukan tindakan memonitoring atau mengontrol terhadap pengawasan berlakunya UU keterbukaan informasi publik di daerah, sebagai bentuk dari salah satu wujud dari proses partisipasi publik dalam menegakkan terselenggaranya hak masyarakat mengenai akses informasi publik, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kedua, yaitu membangun kesadaran akan kepemilikan hak-hak masyarakat terhadap implementasi UU keterbukaan informasi publik untuk sekiranya mendapatkan informasi, berita, hingga publikasi terhadap kegiatan Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pembangunan dan perwujudan *good governance*, *clean government*, dan *open government* serta kewajiban sebagai warga negara.

Ketiga, tanggap terhadap beberapa informasi-informasi yang bersifat rahasia, ataupun tidak sesuai dengan *SOP (Standart Operating Procedure)* maupun kejanggalan-kejanggalan dalam proses kepemimpinan pemerintahan. Melalui lembaga PPID dan Inspektorat, masyarakat dapat menjalin relasi dan berkoordinasi terhadap upaya-upaya yang disinyalir sebagai proses *menutupi* informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Keempat, menjadikan nama *informasi* sebagai nama yang dibutuhkan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan nama *informasi* tersebut, masyarakat nantinya akan tanggap dan menunjukkan *haus* akan informasi, sehingga tanpa adanya pancingan dari pihak media massa, masyarakat selalu mengontrol dan senantiasa sadar akan program yang dapat mengantarakannya kepada publikasi dari pihak pemerintah, baik dari program *e-government* maupun dari relasinya dengan media massa lokal yang sedang terjalin. ***

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abrar, Ananadya. 2003. *Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: LESFI.
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmastuti, Rini. 2012. *Media Relations: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Eriyanto. 2000. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media Massa*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Osborne, David dan Gaebler Ted. 1996. *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik dalam Abdul Rosyid (penerjemah)*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.
- Rianto, Budi. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: PMN.
- Rosidi, Abidarin. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sumarto, J Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Press.

Makalah dan Jurnal:

- Arifin Asep, 2011. "Pengaruh Reinventing Government dan E-Government Terhadap Good Governance (Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia)". Dalam Makalah Penelitian Utama Program Studi Ilmu Administrasi. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Haboddin Muhtar. 2012. "Gubernur NTB Menjawab". Dalam Penelitian Jejaring Universitas di Indonesia dan Inovasi Pemerintahan. Jogjakarta: IGI FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Hasibuan, A. Zainal. 2005. “*Standarisasi Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah*”. Dalam Jurnal Penelitian Prosiding Konferensi TIK. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hermawan, Dedy. 2008. “*Trust and Network Governance: yang Transparan dan Akuntabel*”. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol.2. Malang: FIA Universitas Brawijaya.

Munir, Badrul. 2012. “*Urgensi Keterbukaan Informasi dan Relevansinya Bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi NTB*”. Disampaikan pada Persentasi Implementasi Pelayanan Publik dalam Otonomi Daerah di Provinsi NTB. Mataram: Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

Sujito, Arie. 2012. “*Keterbukaan Informasi Publik Pasca UU No.14 Tahun 2008 Dalam Catatan Reflektif*”. Dalam makalah utama Analisis UU Keterbukaan Informasi Publik. Jogjakarta: FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Skripsi dan Tesis:

Eko, Sakapurnama. 2011. *Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Restianti, A. Evelia. 2013. *Penyempurnaan Media Public Relations Cetak dan Elektronik di Yayasan Micra Indonesia*. Malang: FISIP Universitas Brawijaya.

Sofiana, Mega. 2012. *Aktivasi dan Penyempurnaan Website Sebagai Media Komunikasi Eksternal Lembaga Paramita Jawa Timur*. Malang: FISIP Universitas Brawijaya.

Zar, Kasyi Mohammad. 2006. *Fungsi Badan Informasi Dan Komunikasi Daerah Dalam Mewujudkan Hak Informasi Masyarakat Berdasarkan Perda No.10/2006*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Surat Kabar dan Bulletin:

Harian Lombok Post. “*Public Services: Sampaikan Keluhan Anda Mengenai Pelayanan Publik di Provinsi NTB, dalam Kolom ini, Kami Siap Membantu Anda!*” Sabtu, 22 Februari 2014.

Harian Suara NTB. “*Rubrik Aspirasi: Masyarakat Bertanya, Pemerintah Menjawab (Tafif Pajak KLU)*”, Senin 26 November 2012.

Bulletin NTB *BerSaing* (Beriman dan Berdaya Saing) Pemerintah Provinsi NTB “*SMS CENTER, Salurkan Aspirasi Anda Baik Berupa Informasi, Saran, Kritisikan Maupun Pertanyaan Atau Pengaduan Melalui: 0811391300*” Edisi Maret 2013.

Regulasi dan Perundang-Undangan:

Standart Operating Procedure Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB Mengenai *Penerbitan Media Website* dan *Pembuatan Berita dalam Media Website* Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Mengenai *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Mengenai *Lembaga Penyiaran Publik*.

Pergub No.35 Tahun 2012 Mengenai *Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB*.

Pergub NTB No.20 Tahun 2008, Mengenai *Program e-government (sms center, website, dan e-procurement)*

Laporan *E-Government* Tahun 2013, Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Website:

[Http://lombokita.com/](http://lombokita.com/)

[Http://ntbprov.go.id/](http://ntbprov.go.id/)

[Http://ppidntbprov.go.id/](http://ppidntbprov.go.id/)

[Http://lpse.ntbprov.go.id/](http://lpse.ntbprov.go.id/)

[Http://lombokpos.co.id/](http://lombokpos.co.id/)

Wawancara:

Alfian Yusni. (Pimpinan Redaksi Lombok Post Mataram)

Agung . (Bagian Manajemen Kita Group)

I Gede Aryadi. (Kepala Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi NTB)

Khotibul Islam. (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram)

Kusmayadi. (Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB)

Kusuma Wijaya. (Wakil Koordinator Kasi Kelembagaan Komunikasi PPID Dishubkominfo)

Sena Puja. (Kasubbag Santel dan LPSE Setda Provinsi NTB)

Yasrul. (Anggota Sub Bagian Santel dan LPSE)

Zul Fahmi. (Wartawan Lapangan Lombokita Mataram)